

**KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH
(TELAAH PEMIKIRAN HAZAIRIN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Di Susun oleh :

WERDARIKA
10921005423

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **”KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH (TELAAH PEMIKIRAN HAZAIRIN)”**dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Nur Hasni (Almh), mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di Surga Allah. Serta Ayahanda tercinta Jamril Moh. Noer yang senantiasa mendo’akan ananda, mendidik dan merawat ananda dengan penuh kasih sayang serta mengajarkan banyak tentang kehidupan ini. Serta adinda Rafidah Zainah yang telah memberikan semangat kepada saya.
2. Nenek ku Hj. Syamsidar, Ocu Hasbirullah S. Thi beserta isteri, Etek Rosmiati S.Ag beserta suami, Mak onga Roslaini, Ayah Dasril S.Ag beserta isteri dan Ayah Martius S.Ag beserta isteri, yang telah banyak memberi bantuan baik

moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Prof. Dr. H.M. NAZIR , selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
4. Bapak Dr. Akabarizan, M. Pd. MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili, M. Ag selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah dan Bapak Zainal Abidin sebagai Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
6. Bapak Prof. Dr. Achmad Mujahiddin, M.Ag selaku penasehat akademik.
7. Bapak Dr. Hajar M, M.Hum dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Penulis ucapkan banyak ribuan terima kasih.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i UIN Suska Riau, Khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
9. Semua teman-teman seperjuangan khususnya lokal 1 yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
10. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 13 Mei 2013

Penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ **KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH (TELAAH PEMIKIRAN HAZAIRIN)**”. Ini ditulis berdasarkan latar belakang Ijma’ Fuqahak yang mengatakan bahwa saudara, baik saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah atau saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apapun, jika berkumpul bersama ayah. Bila dilihat dari aspek hubungan kekerabatan, saudara berada pada derajat keutamaan yang lebih rendah dari pada ayah. Adapun menurut Hazairin saudara tidak terhibat oleh adanya ayah.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara bersama ayah dan tinjauan menurut hukum Islam terhadap pemikiran Hazairin.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (Library Resarch), dengan menggunakan buku Hazairin yang berjudul “ Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith” sebagai rujukan bahan hukum primernya, sedangkan bahan hukum skundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode Deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Hazairin, terhadap kewarisan saudara bersama ayah, yaitu mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

Menurut pemikiran Hazairin, bahwa saudara yang dimaksud ayat 12 dan 176 adalah semua hubungan persaudaraan tanpa ada diskriminasi. Adapun alasannaya, hal ini disebabkan adanya kalimat “*Ghaira Mudharrin*” yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 12. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, karena menurut Hukum Islam ayat 12 surat *an-Nisa* menjelaskan tetang saudara seibu sedangkan ayat 176 surat *an-Nisa* adalah saudara kandung atau seayah.

Adapun pemikiran Hazairin mengenai saudara sebagai ahli waris ketika ada ayah, saudara tetap tampil sebagai ahli waris. Sebab menurut Hazairin tidak ada faktor yang menghambat saudara tampil sebagai ahli waris. Karena menurutnya, bahwa yang bisa menghibab saudara adalah anak (keturunan) baik dari laki-laki maupun dari perempuan. hal tersebut sangat bertentangan juga dengan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, saudara sebagai ahli waris apabila ada ayah maka otomatis saudara terhibab. Hal ini disebabkan arti “*walad*” yang terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 176 tersebut diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat *an-Nisa*, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak. Serta dari *asbabun nuzul* ayat 176 surat *an-Nisa*, bahwa pada kasus ini sahabat tidak mempunyai ayah.

Adapun mengenai siapa saja yang dapat menghibab saudara, Hazairin mengatakan bahwa saudara terhibab apabila pewaris meninggalkan anak (keturunan) baik dari laki-laki maupun dari perempuan. hal ini sesuai dengan konsep *kalalah*-nya. Akan tetapi ini bertentangan dengan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, anak perempuan atau keturunan dari perempuan tidak dapat menghibab saudara. Karena dalam satu riwayat dijelaskan bahwa saudara dapat tampil, meskipun ada anak perempuan dan ibu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
------------------------------------	----------

ABSTRAK	ii
----------------------	-----------

KATA PENGANTAR	iv
-----------------------------	-----------

DAFTAR ISI	vii
-------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
---------------------------------	---

B. Rumusan Masalah	5
--------------------------	---

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
---	---

D. Kerangka pikir	6
-------------------------	---

E. Metode Penelitian	13
----------------------------	----

F. Sistematika Penulisan	16
--------------------------------	----

BAB II AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum	17
-------------------------------------	----

B. Kategori Ahli Waris	25
------------------------------	----

C. Teori Keutamaan dan Hijab	36
------------------------------------	----

BAB III BIOGRAFI HAZAIRIN

A. Riwayat Hidup	50
------------------------	----

B. Pola Pemahaman Terhadap al-Qur'an dan Hadits	54
---	----

C. Pemikiran Hazairin Tentang Pemikiran Hazairin	58
--	----

D. Sumbangannya Terhadap Ilmu Pengatahuan	61
---	----

BAB IV KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH

A. Pemikiran Hazairin.....	64
B. Pemikiran Hazairin Menurut Tinjauan Hukum Islam	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang hukum waris secara sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Setiap ahli waris sudah ditetapkan haknya, yang mereka terima setelah pemiliknya meninggal dunia¹.

Hukum kewarisan merupakan suatu aturan yang mengatur bagaimana cara atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli warisnya).² Dalam hukum kewarisan mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Selain itu keutamaan itu juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan³. Adanya perbedaan kekerabatan ditegaskan oleh Allah pada QS Al-Anfal (8) : ayat 75.



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, Cet. 1, h. 204-205.

² Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

³ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Panam: Alaf Riau, 2008), h. 26.

menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu”⁴.

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan islam mengenal adanya lembaga hijab. Hijab berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya⁵. Misalnya kewarisan saudara, *Ijma' Fuqahak* mengatakan bahwa saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan tidak mendapatkan apapun, jika berkumpul bersama ayah⁶. Termasuk mazhab syafiiyah mengatakan bahwa ayah menghibab saudara. Bila dilihat dari aspek hubungan kekerabatan, saudara berada pada derajat keutamaan yang lebih rendah dari pada ayah⁷.

Saudara sebagai ahli waris didasarkan pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa. Menurut Ahlus Sunnah surat an-Nisa' ayat 12 adalah saudara seibu, dan surat an-Nisa' ayat 176 adalah saudara kandung atau saudara seayah. Hal ini berkaitan juga dengan pengertian *Kalalah*, sebab saudara baru bisa tampil sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dalam keadaan *Kalalah*. *Kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan ayah. Istilah ini didefinisikan oleh Abu Bakar Siddiq dan pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Umar,

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

⁵ Hajar M, *Op.cit*, h. 27.

⁶ Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 395.

⁷ Hajar M, *Op.cit*, h. 36.

Ali dan Ibnu Mas'ud. Riwayat mengenai pendapat itu disahihkan bukan hanya oleh seorang yang diterima dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, pendapat itu dipegang juga oleh Asy Sya'bi, An-Nakha'I, Al-Hasan, Qatadah, Jabir bin Zaid dan Al-Hakam. Serta dipegang oleh para Ulama Salaf, Khalaf, Ulama Madinah, Kufah dan Bashrah⁸.

Adapun menurut Hazairin, dia mengatakan sebaliknya. Meskipun ada Bapak (ayah), saudara-saudara dapat tampil sebagai ahli waris⁹. Sesuai dengan konsep *Kalalah* Hazairin, maka saudara hanya dihibab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seluruh keturunan pewaris. Adapun ayah tidak dapat menghibab saudara¹⁰.

Menurut Hazairin saudara dalam kedua ayat 12 dan 176 surat an-Nisa tersebut adalah semua jenis hubungan darah persaudaraan (non diskriminatif), bisa sekandung, bisa seapak atau bisa seibu. Perbedaannya pada *kalalah* surat An-nisa: 12 ayah masih ada dan pada *kalalah* surat An-nisa: 176 ayah sudah tidak ada¹¹. Dalam ayat *An-Nisa: 12* kemungkinan ahli waris yang ada ialah saudara, ibu, dan janda atau duda, yang kesemuanya itu *dzawu al-fara'idh* (ahli waris yang telah memiliki bagian pasti), dan adanya saudara menjadi syarat mutlak untuk *kalalah*. Tidak ada faktor yang menghambat ikutnya ayah hadir dalam pembagian sebagai *dzawu al-qarabat* (ahli waris

⁸ Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet. 1, Jilid 1, h.664.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (t.tmt, Penerbit IND-HILL, 1987) Edisi Revisi ke 2, h.82.

¹⁰ Hajar M, *Op.cit*, h.66

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1981), h. 54

yang memiliki bagian terbuka atau mendapatkan sisa). Ayah tidak berhak menyingkirkan saudara-saudara sebagai *dzawu al-fara'idh*, maka saudara juga tidak berhak menyingkirkan ayah sebagai *dzawu al-qarabah*, asal saja kemungkinan ada sisa untuk *dzawu al-qarabah*¹².

Sebagai ilustrasi dicontohkan: Pewaris meninggalkan ahli waris diantaranya Ayah, Ibu dan saudara perempuan kandung. Menurut pembagian Hazairin, Ayah sebagai *dzawu al-qarabah* mendapatkan bagian $\frac{4}{6}$ setelah harta dibagi dengan, Ibu $\frac{1}{6}$ dan saudara perempuan kandung $\frac{1}{6}$. Bila harta tersebut terdiri dari uang sebesar Rp. 60.000, maka ayah mendapatkan Rp. 40.000, Ibu mendapatkan Rp. 10.000, dan saudara perempuan kandung mendapatkan Rp. 10.000

Adapun pembagian menurut Syafi'i adalah: Saudara perempuan kandung terhibah oleh ayah. Jadi ayah mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$. Dan jika harta tersebut juga terdiri dari Rp. 60.000, maka Ayah mendapatkan Rp. 40.000, dan Ibu mendapatkan Rp. 20.000.

Berdasarkan ilustrasi di atas, adanya perbedaan antara Ijma' Ulama dengan Hazairin. Ijma' Ulama dan Hazairin juga mempunyai persamaan, yaitu mereka sepakat bahwa saudara adalah sebagai ahli waris. Akan tetapi Ijma' Ulama sepakat bahwa saudara tidak dapat menjadi ahli waris apabila ada ayah baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu.

Sedangkan menurut Hazairin, bahwa saudara itu berhak mewarisi ketika ada ayah. Ayah ketika ada saudara adalah sebagai *dzawul qarabah*, sedangkan saudara adalah sebagai *dzawul furudh*. Tidak ada perbedaan antara

¹² Moh.Dja'far, *Polemiik Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2007) h. 51.

saudara sekandung, seayah atau seibu, mereka menerima hak kewarisan dengan bagian yang sama.

Berdasarkan Fenomena di atas, penulis sangat merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah tentang pemikiran Hazairin. Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH”** (Telaah Pemikiran Hazairin).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika mewarisi bersama ayah?
2. Bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika mewarisi bersama ayah menurut tinjauan hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika mewarisi bersama ayah
 - b. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika mewarisi bersama ayah menurut tinjauan hukum islam.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang pemikiran Hazairin terhadap kewarisan saudara bersama ayah
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, masalah kewarisan saudara dalam hukum kewarisan ketika bersama ayah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana syari'ah pada jurusan Ahwal al-Syakshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Kerangka Pikir

1. Teori Syahadat

Teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua *kalimah* syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya itu. Teori ini dirumuskan oleh al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain: Surat ke-1 ayat 5; Surat ke-2 ayat 179; Surat ke-3 ayat 7; Surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; Surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori syahadat atau juga disebut dengan teori kredo ini adalah kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum islam.¹³

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suryalaya, 2009), h. 69.

Teori syahadat atau kredo mengharuskan seseorang tunduk dan patuh kepada hukum yang dianutnya. Landasan filosofis lahir teori ini adalah kesaksian untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat *syahadah* yang didasarkan pada al-Qur'an Surat ke-1 (al-Fatihah) ayat 5 yang berbunyi:



Artinya: “*Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.*”

Berdasarkan prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum islam merupakan suatu ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya secara total kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha Esaan Nya dan manifestasi kesyukuran kepadanya.¹⁴

Teori syahadat sebagai kelanjutan prinsip tauhid ini adalah bersifat umum. Terdapat pula teori atau asas-asas khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang hukum islam. Satu diantara bidang hukum tersebut adalah *Fiqh Mawarits* atau Hukum Kewarisan Islam. Dalam kewarisan islam terdapat suatu prinsip yang lazim dikenal dengan *ijbari*. *Ijbari* adalah bahasa arab yang berarti paksaan (*compulsory*). Maksudnya, melakukan sesuatu diluar kehendak. Berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku

¹⁴Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994), h. 269.

secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris.¹⁵Prinsip ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang pindah dan orang-orang yang akan menerima harta.¹⁶

Aspek yang pertama yaitu peralihan harta, dapat dilihat firman Allah surat an-Nisa(4):7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada “*nashib*” dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata “*nashib*” berarti bagian, saham atau jatah dari seseorang (pewaris). artinya bahwa dari jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, terdapat hak ahli waris.

Aspek yang kedua yaitu jumlah harta yang berpindah sudah jelas ditentukan didalam surat an-Nisa(4):7. Pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi. Kata “*mafrudhan*” berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Maksudnya bahwa jumlah harta itu sudah ditentukan dan harus dilakukan secara mengikat dan memaksa.

Adapun pada aspek yang ketiga yaitu siapa-siapa yang menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta warisan sudah ditentukan secara pasti. Manusia tidak memiliki otoritas sedikitpun. Ketentuan ini dapat dipahami didalam surat an-Nisa(4): 11,12 dan 176.

Secara keseluruhan, hukum kewarisan islam wajib dilaksanakan. Kata “*Yushikum Allah*”berarti mensyariatkan atau memerintahkan. Hal

¹⁵ Hajar M, *Op.cit*, h. 10.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128

yang lebih penting lagi, al-Qur'an surat an-Nisa(4): 13 dan 14 menyatakan bahwa barang siapa yang menaati undang-undang Allah, akan dimasukkan kesurga dan kekal didalamnya. Sebaliknya orang yang mengingkarinya atau melanggar masuk ke neraka dan kekal di dalamnya¹⁷.

2. Teori Ahli Waris

Ahli waris adalah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹⁸

Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Ahli waris hubungan darah ditentukan pada saat peristiwa kelahiran. Sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah.¹⁹

Ahli waris hubungan darah terdiri dari empat kategori, yaitu garis keturunan "*bunuwah*", leluhur "*ubuawah*", kesamping pertama "*ukhuwah*", dan garis kesamping kedua "*umumaah*".

Garis keturunan *bunuwah* terdiri dari: Anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa ayat 11. Cucu, baik

¹⁷Hajar M, *Op.cit*, h. 11.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 210-211.

¹⁹Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970), h. 328.

laki-laki maupun perempuan berdasarkan perluasan pemahaman kata *awlad* dalam surat an-Nisa ayat 11.²⁰

Garis leluhur *ubuwah* diantaranya adalah: Ayah dan Ibu, kedua ahli waris tersebut dasar hukumnya surat an-Nisa ayat 11.²¹ Kakek, dasar hukumnya adalah hadits dari Imran ibn Husen menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tarmizi, yang maksudnya bshwa seorang laki-laki menghadap Rasul, lalu mnegatakan: “cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya”. Jawab Nabi, bahwa untuk kamu seperenam.²² Nenek, dasar hukumnya dapat diahami dari perluasan pengertian *umm* pada ayat 11 surat an-Nisa serta terdapat juga dalam hadits.²³

Ahli waris garis hubungan kesamping pertama (*ukhuwah*): Saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, sekandung, seayah maupun seibu. Hubungan Dasar hukumnya yaitu pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa. Anak saudara, anak saudara secara jelas tidak terdapat hak kewarisannya dalam al-Qur'an dan juga tidak dalam hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya adalah melalui perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan dalam al-Qur'an, karena bila saudara tidak ada, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Dan anak saudara itu

²⁰Hazm, Ibnu, al-Andalusi, *al- Muhalla*, (Libanon: Maktabah al-Tijari, tt), Juz IX, h. 304.

²¹ Hajar M, *Op.cit*, h. 33.

²²Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II, h. 108.

²³Hajar M, *Op.cit*, h. 34

belum akan mendapatkan haknya selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup.²⁴

Adapun ahli waris garis kesamping kedua “*umumah*” adalah:Paman, berdasarkan hasil *ijtihad* para ulama. Anak paman, bahwa anak paman ini diperoleh dari perluasan dari pengertian paman. Dengan begitu yang disebut dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah; sedangkan anak yang dimaksud adalah anak laki-laki.²⁵

Adapun ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dunia, dan begitu pula istri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat istri.²⁶

Adapun kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah *Zul Arham*. Yang dimaksud dengan ahli waris *zul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadits Nabi sebagai *dzawul furudh* dan tidak pula dalam kelompok *ashabah*. Bila kerabat yang menjadi

²⁴Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 218.

²⁵*Ibid*.

²⁶Hajar M, *Op.cit*, h. 38.

ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *zul arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.²⁷

3. Teori Keutamaan dan *Hijab*

Hukum kewarisan islam juga mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak antara hubungan ahli waris dengan pewaris. selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan.²⁸ Adanya perbedaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allah pada ayat 75 surat al-Anfal:



*“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*²⁹

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan islam mengenal adanya lembaga *hijab*. *Hijab* adalah tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.³⁰

²⁷Amir Syarifuddin,*Garis-garis besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003), Cet. 1, h. 168-169.

²⁸Hajar M, *Loc.cit*.

²⁹Departemen Agama RI, *Loc,cit*.

³⁰ Hajar M, *Loc.cit*.

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*.³¹ *Hijab hirman* disebut juga dengan *hijab total* dan *hijab nuqshan* disebut dengan *hijab sebagian*.³² *Hijab Hirman* adalah tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima hak kewarisan secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sedikitpun. Adapun *hijab nuqshan* adalah berkurangnya harta yang seharusnya diperoleh ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain.³³ Rincian *hijab hirman* diantaranya sebagai berikut:

1. Cucu ditutup oleh anak laki-laki
2. Kakek ditutup oleh ayah
3. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah
4. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki dan ayah
5. Saudara seayah ditutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandung
6. Saudara seibu ditutup oleh anak, cucu, ayah dan kakek dan lain-lain³⁴.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan pendekatan *Conseptual* dengan cara meneliti hasil pemikiran Hazairin tentang hak saudara

³¹ *Ibid.*

³² Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 93

³³ Hajar M, *Op.cit*, h. 27-29.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.49-50.

bersama ayah. Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.³⁵

2. Spesifikasi

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan maksud memperoleh gambaran tentang kewarisan saudara bersama ayah (telaah pemikiran Hazairin).

Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Hazairin, terhadap kewarisan saudara bersama ayah. Yang mana pemikirannya tersebut, nampak adanya pembaharuan hukum kewarisan islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier.³⁶

³⁵Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189.

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12-14.

Bahan hukum primer, berupa: Buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith(Hazairin). Dilengkapi juga dengan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan skunder berupa buku-buku sebagai berikut: Hukum Kewarisan Islam(Idris Ramulyo), Polemik Hukum Waris(Moh Dja'far), Ahli Waris Sepertalian Darah(Al-Yasa' Abu Bakar), Filsapat Hukum Kewarisan Islam(Abdul Ghofur Anshori). Serta bahan hukum tersiernya adalah Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia(Ahmad Warson Munawwir)dan Ensiklopedi Hukum Islam dan lain-lain.

4. Tehnik Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dilakukan melalui kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun subtansi hukum itu sendiri. Tehnik menggunakan analissa yuridis yaitu penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.

Bahan-bahan atau data-data yang relevan dengan objek penelitian yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menurut cara-cara berikut:

- a) Yuridis Normatif, yaitu berupa pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis kaedah-kaedah hukum yang diistinbatkan atau ditetapkan yang erat hubungannya dengan objek penelitian
- b) Yuridis Historis, yaitu meneliti sekaligus menganalisis hukum yang sudah ada pada masa mujtahid terdahulu hasil dari Ijma' Fuqahak yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan

Bab Kedua Pembahasan Ahli Waris Menurut Hukum Islam berupa, Pengertian dan Dasar Hukum, Kategori Ahli Waris, Tingkat keutamaan diantara Ahli Waris.

Bab Ketiga Biografi Hazairin, berupa Riwayat Hidup, Pemahaman dan Pemikirannya, serta Sumbangannya terhadap Ilmu Pengatahuan

Bab Keempat Kewarisan saudara bersama Ayah (Menurut Hazairin), meliputi: Pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika bersama ayah, dan Pemikiran Hazairin tentang kewarisan saudara ketika mewarisi bersama ayah menurut tinjauan hukum islam.

Bab Kelima Kesimpulan dan Saran. Kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fikih adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³⁷ Adapun menurut definisi yang lain, di antaranya:

Idris Ramulyo, mendefinisikan Ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, ahli waris diartikan seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan³⁹

Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan, bahwa ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan

³⁷ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 210-211.

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. 5, h. 262.

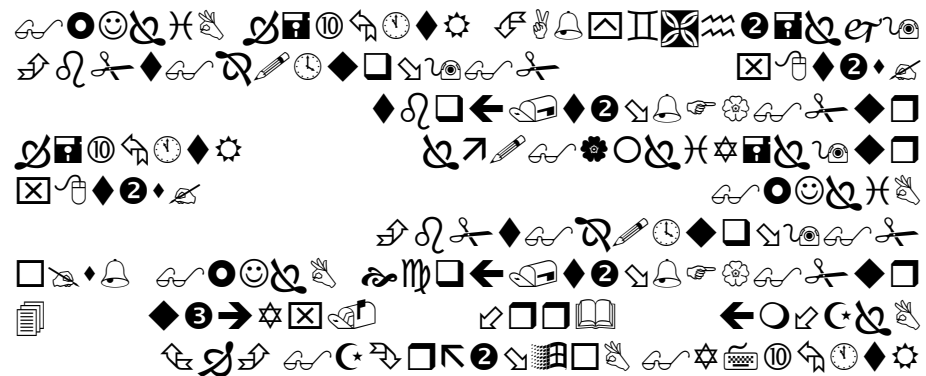
⁴⁰ Himpunan perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2007), h. 56.

adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

sDasar dan sumber utama dari Hukum Islam, sebagai dari Hukum Agama(Islam) adalah Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat yang mengatur kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

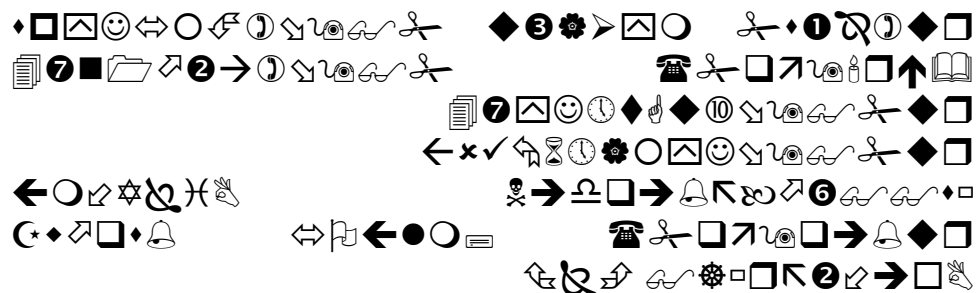
1. Ayat-ayat al-Qur'an diantaranya:

a. QS. *an-Nisa* (4):7



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.⁴¹

b. QS. *an-Nisa* (4):8



⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 78.

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”⁴²

c. QS. *an-Nisa*(4):11



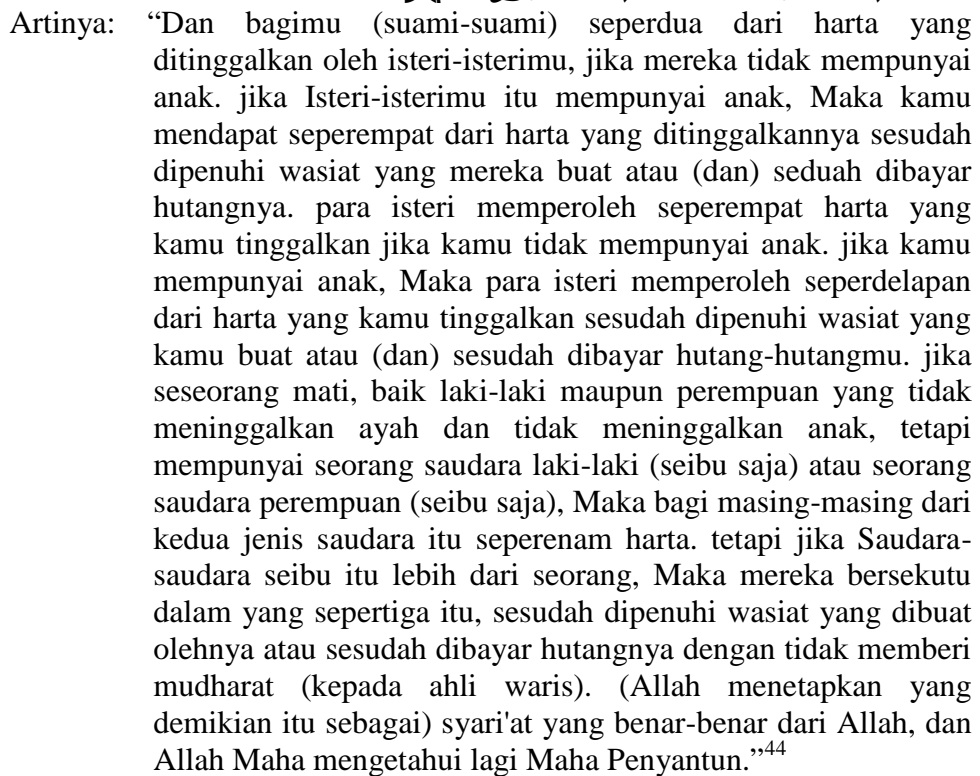
Artinya: “Allah mensyari’atkan(mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, Maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

⁴² Ibid.

d. QS. *an-Nisa*(4):12

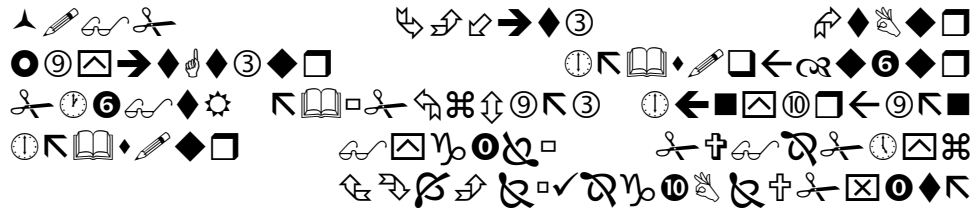
[illegible]

⁴³*Ibid.*



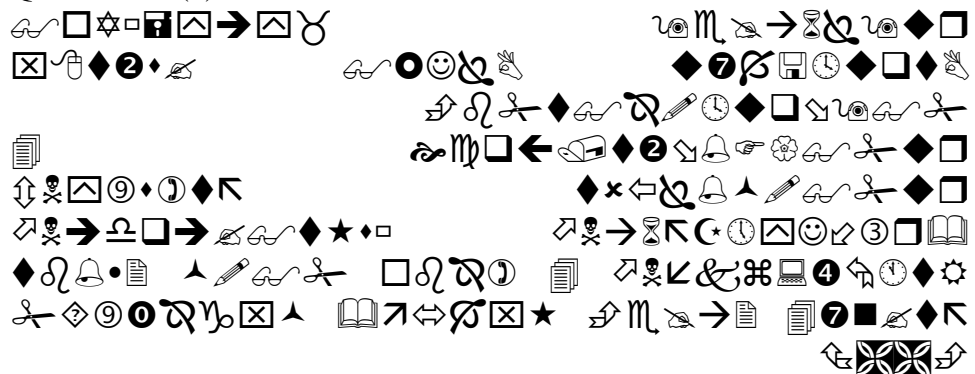
⁴⁵*Ibid.*

f. QS. *an-Nisa'*(4):14



Artinya: Dan barang siapa yang mengdurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.⁴⁶

g. QS. *an-Nisa'*(4):33



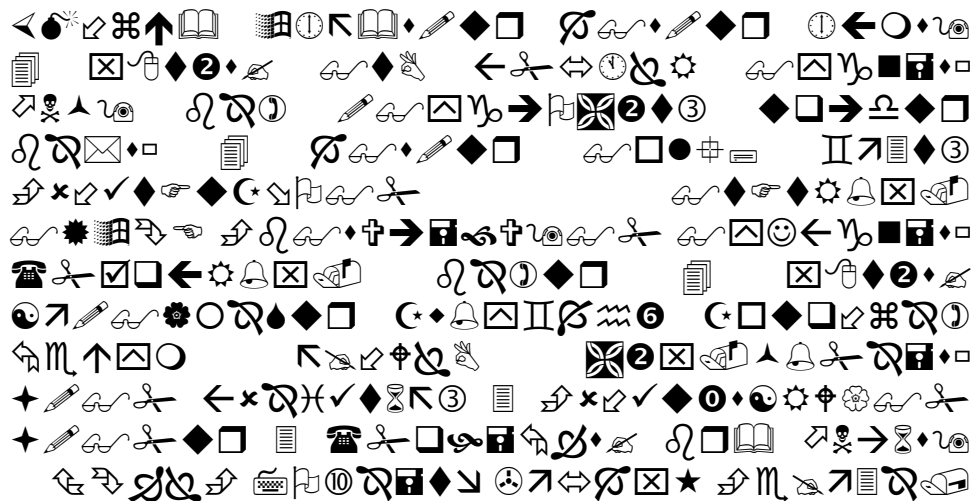
Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karibkerabatnya. Dan orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴⁷

h. QS. *an-Nisa*(4):176



⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁸

2. Sunnah Nabi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari, berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر⁴⁹

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, Berkata ia: Berikanlah*

Faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran) kepada

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Bukhari, Al, *Al-Jami'Sahihu al-Bukhari*, (Kairo: Daru wa mathaba'ah'u al-Sya'bi), Juz VII, h. 181

yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

- b. Hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi:

عبد الله قال جاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله ص م الى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك.⁵⁰

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata ia: Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang hukum kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untuk kamu.

- c. Hadits dari Huzail bin Surhail menurut riwayat kelompok perawi hadits selain muslim yang berbunyi:

عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف واءت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت.⁵¹

Artinya: Dari Huzail bin Surhail berkata ia: Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa menjawab: untuk anak perempuan

⁵⁰ Daud, Abu , *Op.cit*, h. 109

⁵¹ Bukhari, Al, *Op.cit*, h. 188

seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentudialah akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, dan ia menjawab: saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Allah, yaitu: untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan.

- d. Hadits dari Imran bin Husain menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tarmizi sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ⁵²

Artinya: *Dari Imran bin Hushain bahwasanya seseorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW, dan berkata: Cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya. Nabi menjawab: untukmu seperenam.*

- e. Hadits dari Qabishah bin Zueb menurut parawi hadits, selain an-Nasa'iy yang berbunyi:

عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر⁵³

Artinya: *Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan kepada cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar:” Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya pada*

⁵² Daud, Abu, *Op.cit*, h. 109.

⁵³ Isa al-Tarmizi, Abu, *al-Jami' al-Sahih*, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1938), h. 320.

orang lain tentang hal ini” Mughirah bin Su’bah berkata:” saya pernah menghadiri Nabi memberikan nenek sebanyak seperenam”. Berkata Abu Bakar:” Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya.” Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memeberikan hak kewarisan nenek itu.

- f. Hadits dari Abu Hurairah ra. Menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث.⁵⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Rasul Allah SAW, bersabda: pembunuh terhalang mewarisi.*

B. Kategori Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.⁵⁵ Ahli waris terdiri dari 3 kategori, yaitu *dzawu al-furudh*, *ashabah* dan *dzawu al-arham*:

1. Ahli waris *dzawu al-furudh*

Ahli waris *dzawu al-furudh* adalah Ahli waris yang memperoleh hak kewarisan secara pasti. *dzawu al-furudh* diantaranya:

- 1) Anak perempuan. Ia mendapatkan seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.⁵⁶ Jika ada anak

⁵⁴ Daud, Abu, *Op.cit*, h. 100.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Loc.cit*.

⁵⁶ Hajar M, *Op.cit*, h. 38-39.

laki-laki maka anak perempuan tersebut tertarik menjadi *ashabah*.

Tentang bagiannya, anak laki-laki dua lipat dari anak perempuan.⁵⁷

- 2) Cucu perempuan. Ia mendapatkan hak kewarisan seperdua bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Bila ia dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga tanpa didampingi oleh cucu laki-laki. Cucu perempuan menerima seperenam bila ia mwarisi bersama seorang anak perempuan.⁵⁸
- 3) Ibu ada tiga alternatif bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Alternatif yang ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.⁵⁹
- 4) Nenek mendapatkan seperenam dalam keadaan apapun.
- 5) Saudara perempuan kandung mendapatkan bagian dalam beberapa kemungkinan. Seperdua apabila dia hanya seorang dan tidak ada saudara laki-laki; dua pertiga apabila dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki kemudian antara mereka berbagi sama banyak.⁶⁰

⁵⁷ Moh. Anwar, *FARA'IDL: Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 62.

⁵⁸ Hajar M, *Op.cit*, h. 39.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 226-227.

- 6) Saudara perempuan seayah mendapatkan seperdua apabila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus ini terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah mendapat seperenam.
- 7) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan seperenam bila seorang dan mendapatkan sepertiga bila dua orang atau lebih.⁶¹
- 8) Suami mendapatkan seperempat apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapatkan seperdua apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 9) Istri mendapatkan seperdelapan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan mendapatkan seperempat apabila tiada anak atau cucu dari anak laki-laki.⁶²
- 10) Ayah dan kakek. Ayah menerima hak kewarisan seperenam, jika pewaris meninggalkan anak dan cucu, baik laki-laki atau perempuan. Ayah mendapatkan seperenam dan sisa apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki. Sedangkan kakek mendapatkan hak yang sama dikala tidak ada ayah.⁶³

2. Ahli waris *ashabah*

⁶¹ Hajar M, *Op.cit*, h. 41.

⁶² Moh. Anwar, *Op.cit*, h. 60-61.

⁶³ Hajar M, *Loc.cit*.

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris *dzawu al-furudh*⁶⁴.

Kata *ashabah* dalam penggunaan bahasa arab dikhususkan pada kerabat yang laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh atau sisa harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki, maka pengertian *ashabah* dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta sesudah dikeluarkan bagian untuk *dzawu al-furudh*. Ahli waris *ashabah* terdiri dari tiga kelompok, yaitu *ashabah bi nafsih*, *ashabah bi ghoayrihi* dan *ashabah ma'a ghayrihi*.⁶⁵

Ashabah bi nafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan.⁶⁶ Mereka itu adalah:

- a. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi seluruh atau sisa harta. Dengan adanya anak laki-laki, maka tidak ada ahli waris yang lain berhak sebagai *ashabah*. Ahli waris yang lain hanya sebagai *dzawu al-furudh*, dan yang mungkin mewarisi bersama anak laki-laki hanya ayah, ibu, suami atau isteri.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Fatchur Rahman, '*Ilmu al-Mawarits*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1994), Cet 3, h. 340.

- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai *ashabah* bila tidak ada algi anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama ahli waris ayah, ibu, suami atau isteri.
- c. Ayah yang berkedudukan sebagai *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu.
- d. Kakek juga berkedudukan sebagai ahli waris apabila tidak ada ayah. Karena kakek menggantikan posisi ayah. Kakek tidak dapat menutup hak saudara, akan tetapi ayah dapat menutup hak saudara, kecuali saudara seibu. Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah.⁶⁷
- e. Saudara laki-laki kandung berhak sebagai *ashabah* apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.⁶⁸
- f. Saudara laki-laki seayah ia berkedudukan sebagai *ashabah* dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau menjadi ahli waris secara *ashabah* apabila sudah tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah mewarisi secara *ashabah* apabila tidak ada ahli waris anak laki-laki kandung atau yang menutup anak laki-laki kandung.

⁶⁷ Hazm, Ibnu, *Op.cit*, h. 282.

⁶⁸ *Ibid*.

- i. Paman kandung yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak ada lagi anak laki-laki daari saudara seayah dan yang menutupnya.
- j. Paman seayah yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang menghibah paman kandung.
- k. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai *ashabah* apabila tidak ada ahli waris paman seayah dan yang menghibah paman seayah.
- l. Anak laki-laki dari paman seayah. Ia menempati ahli waris *ashabah* apabila tidak ada anak laki-laki paman kandung atau yang dapat menghibah anak laki-laki dari paman kandung tersebut.⁶⁹

Ashabah bil ghayrihi adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima ‘*ushubah*.⁷⁰ *Ashabah bil ghayrihi* itu ada 4 orang wanita yaitu, anak perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.

Apabila salah seorang dari perempuan-perempuan tersebut bersama-sama dengan seorang *mu’ashshib binnafsi* yang sama derjat dan kekuatan-kekuatannya, ia menjadi *ashabah bil ghayir*(bersama dengan orang lain). Adapun laki-laki yang menjadi *mu’ashshib*-nya perempuan tersebut diantaranya:

⁶⁹ Hajar M, *Op.cit*, h. 43-44.

⁷⁰ ‘*Ushubah* adalah sisa. Lihat, Fatchur Rahman, *Op.cit*, h. 618.

- a. Anak laki-laki kandung. Ia adalah *mu'ashshib*-nya anak perempuan kandung.
- b. Cucu laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Mereka adalah *mu'ashshib*-nya bagi cucu perempuan.
- c. Saudara kandung. Ia adalah *mu'ashshib*-nya saudara perempuan kandung pula.
- d. Saudara seayah. Ia adalah *mu'ashshib*-nya terhadap saudara-saudaranya yang seayah⁷¹.

Adapun ahli waris *ashabah ma'a ghayrihi* adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *ashabah* bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris *ashabah bi nafsih*. Contoh: ahli waris dua orang cucu perempuan (4/6), seorang saudara perempuan kandung(1/6), dan nenek mendapatkan (1/6).⁷²

3. Ahli waris *dzawu al-arham*

Ahli waris *dzawu al-arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadits Nabi sebagai *dzawu al-furudh* dan tidak pula dalam kelompok *ashabah*. Bila kerabat yang menjadi *ashabah* adalah

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hajar M, *Op.cit*, h. 45.

laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *dzawu al- arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan⁷³.

Dzawu al- Arham dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan:

- 1) Garis keturunan lurus kebawah:
 - a. Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya
 - b. Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya
- 2) Garis keturunan lurus keatas:
 - a. Ayah dari ibu dan seterusnya keatas
 - b. Ayah dari ibunya dan seterusnya keatas
 - c. Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya keatas
- 3) Garis keturunan kesamping pertama:
 - a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah
- 4) Garis keturunan kesamping kedua:
 - a. Saudara perempuan (kandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya

⁷³ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 149

- b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah
- c. Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah.⁷⁴

Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Ahli waris hubungan darah ditentukan pada saat peristiwa kelahiran. Sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah.⁷⁵

Ahli waris hubungan darah terdiri dari empat kategori, yaitu garis keturunan “*bunuwah*”, leluhur “*ubuawah*”, kesamping pertama “*ukhuwah*”, dan garis kesamping kedua “*umumaah*”.

1. Garis keturunan *bunuwah* adalah:

- a. Anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa ayat 11.
- b. Cucu, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan perluasan pemahaman kata *awlad* dalam surat an-Nisa ayat 11.⁷⁶ Dalam penentuan ahli waris cucu ini terdapat perbedaan pendapat. Ahlu Sunnah mengatakan bahwa cucu atau keturunan garis kebawah itu terbatas pada keturunan yang melalui laki-laki dan tidak dihubungkan

⁷⁴ Amir Syarifuddin, (*Garis-garis besar FIQH*), *Loc.cit.*

⁷⁵ Qudamah, Ibnu, *Loc.cit.*

⁷⁶ Hazm, Ibnu, *Loc.cit.*

kepada keturunan melalui perempuan. Oleh sebab itu, cucu yang berstatus sebagai ahli waris adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Akan tetapi menurut Syiah cucu itu adalah anak dari anak laki-laki dan anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.⁷⁷

2. Garis leluhur *ubuwwah* diantaranya adalah:

- a. Ayah dan Ibu, kedua ahli waris tersebut dasar hukumnya surat an-Nisa ayat 11.⁷⁸
- b. Kakek, dasar hukumnya adalah hadits dari Imran ibn Husen menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tarmizi, yang maksudnya bshwa seorang laki-laki menghadap Rasul, lalu mengatakan: “ cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya”. Jawab Nabi, bahwa untuk kamu seperenam.⁷⁹
- c. Nenek, dasar hukumnya dapat diahami dari perluasan pengertian *umm* pada ayat 11 surat an-Nisa serta terdapat juga dalam hadits.

3. Ahli waris garis hubungan kesamping pertama (*ukhuwah*):

- a. Saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, sekandung, seayah maupun seibu. Hubungan kepada pewaris adalah melalui ayah dan atau ibu. Dasar hukumnya yaitu pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisa. Ayat 12 dikhususkan untuk menjelaskan saudara seibu,

⁷⁷ Hajar M, *Op,cit*, h.32-33.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ Daud, Abu, *Loc.cit*.

sedangkan ayat 176 ditetapkan pula untuk menjelaskan saudara sekandung atau saudara seayah.⁸⁰

- b. Anak saudara, anak saudara secara jelas tidak terdapat hak kewarisannya dalam al-Qur'an dan juga tidak dalam hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya adalah melalui perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan dalam al-Qur'an, karena bila saudara tidak ada, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Dan anak saudara itu belum akan mendapatkan haknya selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih hidup.⁸¹

4. Adapun ahli waris garis kesamping kedua "*umumah*" adalah:

- a. Paman, berdasarkan hasil *ijtihad* para ulama. Kelompok Ahli Sunnah mengatakan bahwa paman yang termasuk ahli waris adalah saudara laki-laki kandung seayah dan saudara laki-laki seayah dengan seayah.⁸²
- b. Anak paman, bahwa anak paman ini diperoleh dari perluasan dari pengertian paman. Dengan begitu yang disebut dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah; sedangkan anak yang dimaksud adalah anak laki-laki.⁸³

⁸⁰ Hajar M, *Op.cit*, h. 34-35.

⁸¹ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Loc.cit*.

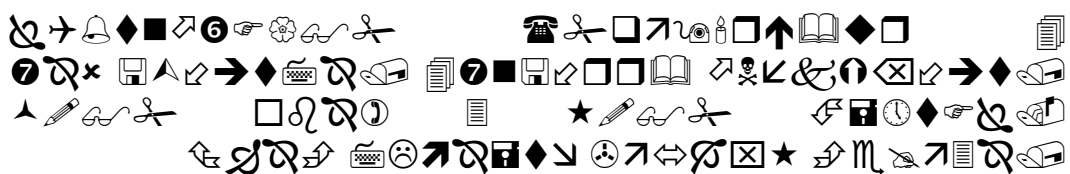
⁸² Ja'far ibn Husen, Najamuddin, *Syara'i al-Islami*, (Teheran: Mansurati al-Ala, 1969), Jilid IV, h. 9.

⁸³ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Loc.cit*.

Adapun ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dunia, dan begitu pula istri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan terhadap kerabat suami atau kerabat istri. Dalam hal ini anak tiri dari suami atau anak tiri dari istri bukan ahli waris bagi suami istri, tetapi hanya ahli waris bagi ayah dan ibunya.⁸⁴

C. Teori Keutamaan dan *Hijab*

Hukum kewarisan islam juga mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak antara hubungan ahli waris dengan pewaris. selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan.⁸⁵ Adanya perbedaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allah pada ayat 75 surat al-Anfal:



“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸⁶

⁸⁴ Hajar M, *Loc.cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan islam mengenal adanya lembaga hijab.⁸⁷ Hijab artinya dinding.⁸⁸ Menurut istilah *faraidh* adalah tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.⁸⁹ *Hijab* terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*.⁹⁰

Hijab nuqshan atau disebut juga dengan hijab sebagian.⁹¹ *Hijab nuqshan* adalah berkurangnya harta yang seharusnya diperoleh ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain. Berkurangnya hak yang diterima adalah untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris tertentu untuk secara bersama menikmati harta warisan. Misalnya, anak atau cucu mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Anak dan cucu mengurangi hak suami menjadi seperempat, isteri menjadi seperdelapan, dan lainnya.⁹²

Hijab Hirman disebut juga dengan hijab total,⁹³ yaitu tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima hak kewarisan secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sedikitpun. Rincian hijab hirman adalah sebagai berikut:

1. Cucu baik laki-laki maupun perempuan ditutup oleh anak laki-laki

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

⁸⁷ Hajar M, *Loc.cit.*

⁸⁸ Moh. Anwar, *Op.cit*, h. 84

⁸⁹ Hajar M, *Loc.cit.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 93.

⁹² Hajar M, *Op.cit*, h. 27-29.

⁹³ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Loc.cit.*

2. Kakek ditutup oleh ayah.
3. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah
4. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki dan ayah
5. Saudara seayah ditutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandung
6. Saudara seibu ditutup oleh anak, cucu, ayah dan kakek
7. Anak saudara kandung ditutup oleh saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah
8. Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak saudara kandung
9. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah
10. Paman seayah ditutup paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup paman kandung
11. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan ahli waris yang menutup paman seayah
12. Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak laki-laki paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki kandung.⁹⁴

Dalam hal posisi kakek dan saudara sebagai ahli waris menjadi polemik dikalangan para sahabat maupun mujtahid sesudahnya, yaitu apakah kakek menghibah saudara, atau saudara menghibah kakek, maupun tidak saling menghibah. Perbedaan antara posisi kakek dan saudara ini muncul disebabkan

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 49-50

perbedaan pendapat dalam memahami konsep *kalalah* yang terdapat pada ayat 12 dan 176 an-Nisa. Abu Hanifah mengatakan bahwa maksud *kalalah* ialah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris saudara, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya laki-laki, ayah dan termasuk kakek.⁹⁵ Jadi, menurut Abu Hanifah bahwa kakek dapat menghibah saudara. Sehingga hukum *kalalah* praktis hanya dapat dipergunakan jika orang mati punah ke bawah dan punah ke atas.⁹⁶ Serta Abu Hanifah menempatkan posisi kakek lebih dekat dan utama kepada pewaris dibandingkan dengan saudara, sehingga kakek menghibah saudara.⁹⁷ Pendapat Abu Hanifah ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar dan juga diikuti oleh Ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubeir, Usman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Musa. Golongan yang kedua dipelopori oleh Zaid ibn Tsabit, Ibnu Mas'ud, yang kemudian diamalkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad Syaibaini dari kalangan Hanafiyah, al-Auza'i berpendapat bahwa saudara dapat tampil bersama kakek atau kakek tidak bisa menghibah saudara. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah:

- a. Bahwa saudara-saudara itu hak kewarisannya ditetapkan dengan *nash* yang *sharih* (jelas dan pasti) dan tidak mungkin ia dihibah kecuali bila dinyatakan oleh nash atau ijma'.

⁹⁵ Hajar M, *Op.cit*, h. 64.

⁹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Ed. 1, Cet. 6, h.167.

⁹⁷ Hajar M, *Op.cit*, h. 68.

b. Bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dalam faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan hak warisan oleh karena itu, ia juga berhak mendapatkannya. Ia di hubungkan melalui ayah sebagaimana juga kakek dihubungkan kepada pewaris melalui ayah. Ia hanya terhibab oleh ayah yang menghubungkannya kepada pewaris dan tidak terhibab oleh kakek.⁹⁸

Hazairin, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *kalalah* adalah setiap orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Anak yang dimaksud Hazairin sesuai dengan kata *Awlad* dalam al-Quran surat ke-4 (an-Nisa) ayat 11, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan termasuk juga didalamnya seluruh keturunan dari anak laki-laki dan dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁹ Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian *kalalah* Hazairin di atas. Bahwa menurutnya kehadiran kakek pada saat berdampingan bersama saudara, kakek tidak dapat menghibab saudara.

Pemikiran Abu Hanifah di atas perlu dikaji ulang, karena meskipun hak kakek mengikuti hak waris ayah, tidak berarti bahwa kakek menggantikan posisi ayah secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman lafaz *abu* untuk kakek, tidak sama lafaz *ibnu* untuk cucu. Lafaz yang digunakan untuk cucu semata-mata hanya dari *ibnu*. Tidak ada lafaz untuk menyebutkan cucu, sehingga anak dan cucu memiliki kesamaan lafaz dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan lafaz *abu* semata-mata ditujukan kepada ayah, dan pada ayat atau

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 116-117.

⁹⁹ Hazairin, *Op.cit*, h. 50.

hadits tertentu dapat pula dimaksudkan untuk kakek. Lafaz yang khusus untuk kakek adalah *jad*, dan tidak dapat diartikan kepada ayah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lafaz *ibnu* untuk cucu, sementara lafaz *abu* untuk kakek hanya berlaku dalam hal-hal tertentu saja. Jadi lafaz *ibnu* untuk cucu tidak dapat disamakan dengan pengqiasan lafaz *abu* untuk kakek disebabkan perbedaan *illat*.¹⁰⁰

Perbedaan posisi ayah dan kakek dapat juga terlihat dalam kasus *Gharrawayn*, yaitu kasus kewarisan yang ahli warisnya ayah, ibu, suami atau isteri. Pada kasus tersebut, ayah mengurangi hak kewarisan ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ sisa, sehingga ibu memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{6}$. Akan tetapi, bila pada kasus itu ayah diganti oleh kakek, ibu tetap mendapat $\frac{1}{3}$ karena kakek tidak dapat memperkecil hak kewarisan ibu. Apabila kasus kewarisan terdapat nenek dan ayah, nenek dihijab ayah. Jika ayah diganti oleh kakek, maka kakek tidak dapat menghijab nenek, karena mereka berhak mewarisi dalam kasus yang sama.

Ijtihad para sahabat yang mengatakan bahwakakek tidak dapat menghijab saudara, sebagaimana saudara tidak dapat menghijab kakek. Disebabkan alasan mereka mengatakan bahwa hubungan kerabat dari kakek kepada pewaris sama dengan saudara kepada pewaris. kesamaannya, bahwa mereka dihubungkan oleh ayah kepada pewaris, kecuali saudara seibu karena disepakati dihijab oleh kakek. Kedudukan kakek sebagai ahli waris harus diprioritaskan dari saudara, sehingga hak yang diterima menguntungkan

¹⁰⁰ Hajar M, *Op.cit*, h. 69-70.

baginya. Alasan memprioritaskan kakek dari saudara disebabkan bahwa kakek merupakan awal adanya pewaris dan saudara. Keutamaan yang lain, bahwa kakek tidak ditutup oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, sedangkan saudara dihibab oleh keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kakek lebih utama dari saudara.¹⁰¹

Berdasarkan hasil *ijtihad* para sahabat tentang posisi kakek dan saudara sebagai ahli waris, maka mereka berhak mewarisi dalam kasus kewarisan yang sama. Meski demikian kakek harus diprioritaskan hak kewarisan yang menguntungkan bagi kakek. Dalam hal memberikan alternatif hak kewarisan menguntungkan bagi kakek, para sahabat tidak sependapat. Zaid bin Tsabit menetapkan 2 pola, sedangkan Ali bin Abi Thalib menetapkan 5 pola tentang kemungkinan hak kewarisan kakek bersama saudara.¹⁰² Pola yang ditetapkan oleh sahabat Zaid bin Tsabit adalah:

1. Apabila kasus kewarisan terdiri dari ahli waris kakek dan saudara saja, baik saudara kandung atau saudara seayah, laki-laki maupun perempuan, kakek diberihak yang menguntungkan diantara bermuqasamah (berbagi rata) atau $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan.
2. Apabila ahli waris terdiri dari kakek, saudara, dan bersama ahli waris dzawu al-furudh, maka kakek mendapat hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah dengan saudara, $\frac{1}{3}$ sisa setelah dikeluarkan bagian ahli waris *dzawu al-furudh* atau $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Fatchurrahman, *Op.cit*, h. 273.

Adapun pola pembagian hak kewarisan diantara kekek dan saudara yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah:

1. Apabila ahli waris terdiri dari kakek, saudara laki-laki atau bersama saudara perempuan, baik kandung maupun seayah, kakek diberi hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah atau $\frac{1}{6}$ sebagai *dzawu al-furudh*.
2. Bila kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara perempuan kandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, hak untuk kakek adalah yang menguntungkan diantara sisa sebagai *ashabah* atau $\frac{1}{6}$ sebagai *dzawu al-furudh*.
3. Apabila kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara kandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan dan bersama ahli waris *dzawu al-furudh* yang bukan anak atau cucu perempuan, kakek menerima hak yang menguntungkan diantara bermuqasamah atau $\frac{1}{6}$.
4. Apabila kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara kandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan, dan bersama ahli waris anak atau cucu perempuan, maka kakek hanya mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai *dzawu al-furudh* tanpa alternatif pilihan. Jika kakek diberi kesempatan untuk memilih, maka kedudukan kakek tidak berbeda dengan ayah. Oleh sebab itu pada pola yang keempat ini merupakan bukti bahwa kakek berbeda kedudukannya dari ayah.
5. Bila ahli waris dalam kasus kewarisan terdiri dari kakek, saudara kandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak kewarisan untuk kakek $\frac{1}{2}$. Dasar pemikiran Ali bin Thalib adalah bahwa

jika kakek mewarisi bersama saudara kandung, kedudukan kakek harus disamakan dengan saudara kandung, bukan sebagai saudara seayah. Jika kakek mewarisi bersama saudara seayah ketika tidak ada saudara kandung, kedudukan kakek disamakan pula dengan saudara seayah.¹⁰³

Selain dari terhibatnya seseorang sebagai ahli waris, adapula seseorang yang terhalang sebagai ahli waris. Orang yang terhalang tidak berhak mendapatkan warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang mengakibatkan mereka terhalang sebagai ahli waris, yaitu:

1. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini di dasarkan oleh hadits Nabi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث.¹⁰⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Rasul Allah SAW, bersabda: pembunuh terhalang mewarisi.*

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

¹⁰³ Hajar, M, Op.cit, h. 71-78.

¹⁰⁴ Daud, Abu, *Loc.cit.*

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum. Yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati, pembunuhan dalam membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan atau akhirat.¹⁰⁵

Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang hak kewarisan. Namun pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menjadi halangan untuk mendapatkan hak kewarisan.¹⁰⁶

Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama Hambali mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum menjadi halangan mewarisi, sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum tidak mengakibatkan terhalang menjadi ahli waris.

Adapun menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 193.

¹⁰⁶ Khathib, Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Mekkah, Dar al-Katib al-Arabiyy, t.th), h.

sanksi *qishash*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* meskipun sengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.¹⁰⁷

Kelompok Syiah mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan hanya pembunuhan sengaja. Sementara menurut kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi halangan kewarisan. Hal ini sejalan dengan hadits dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an surat ke-5 (*al-Maidah*) ayat 5. Terhalangnya orang yang membunuh menerima kewarisan disebabkan tiga alasan, yaitu:

- a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan putusnya sebab, putus pula "*musabbab*" yaitu hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- b. Pembunuhan adalah suatu kejahatan, sedangkan hak kewarisan adalah adalah suatu kenikmatan.
- c. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat harta warisan(sebagai tindakan preventif).¹⁰⁸

2. Beda agama

Beda agama juga termasuk sebagai penghalang keawarisan.

Dasarnya hadits menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit*, h. 195.

¹⁰⁸ Dalam hal ini terdapat suatu kaedah, yaitu barang siapa yang mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, balasannya adalah tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu. Lihat, Hajar M, *Op.cit*, h. 24.

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي ص م قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا
يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.¹⁰⁹

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda:*

Seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, non muslim tidak bisa mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim. Imamiyah¹¹⁰, Umar, Muaz dan Mua'wiyah berpendapat: Seorang muslim bisa mewarisi non muslim.¹¹¹ Akan tetapi menurut Mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim.¹¹²

Adapun alasan Imamiyah, Umar, Muaz dan Mua'wiyah berpendapat seorang muslim bisa mewarisi non muslim adalah analog kepada dibolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana dikemukakan pada ayat 5 surat al-Maidah. Sedangkan

¹⁰⁹ Al-albani, M. Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2005), Cet. 1, h. 470.

¹¹⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Alih bahasa oleh: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. 27, h. 541

¹¹¹ Hajar M, *Op.cit*, h. 25

¹¹² Mughniyah, Muhammad Jawad, *Loc.cit*.

jumhur tidak menggunakan *qiyas* karena adanya dalil sunnah yang kuat yang bertentangan dengan analog tersebut.¹¹³

Tentang orang murtad, ulama sepakat bahwa semua hartayang diperoleh selama murtad tersebut diserahkan ke negara (baitul mal). Harta yang didapat sebelum murtad diperselihkan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila murtad itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai murtad, hartanya sudah dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi bila yang murtad itu seorang perempuan, hartanya belum boleh diwariskan sebelum perempuan itu mati atau benar-benar bergabung dengan musuh.

Aliran Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara murtad laki-laki dan perempuan. Malik, Syafi'I dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si murtad di simpan di kas Negara. Jika ia mati atau terbunuh dalam peperangan, harta tersebut berstatus *fai'*.¹¹⁴ Jika si murtad kembali kepada islam, harta itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya.¹¹⁵

¹¹³ Hajar M, *Loc.cit.*

¹¹⁴ *Fai* adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk kepentingan umum, seperti dari pajak, bea dan termasuk juga dari si murtad.

¹¹⁵ *Ibid.*

BAB III

BIOGRAFI HAZAIRIN

A. Riwayat Hidup

Hazairin adalah salah seorang tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan, menyuarakan dan membela Hukum Islam agar biasa diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara. Ia lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi,¹¹⁶ dan meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.¹¹⁷

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. 1, h. 51.

Di kebumikan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibrata.¹¹⁸ Hazairin merupakan putra tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang Kabau. Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang Muballigh terkenal di masa itu. Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama adalah dari kakek dan ayahnya.¹¹⁹

Dalam hal pendidikan formal, Hazairin kecil mengawalinya bukan ditanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) tamat tahun 1920. Setelah pendidikan HIS Hazairin melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang dan tamat pada tahun 1924. Saat itu umur Hazairin tergolong muda untuk tamatan MULO. Namun demikian semangat Hazairin untuk terus sekolah semakin membara, kemudian semangat itu di wujudkan dengan melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Almegene Middelbare School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, beliau meninggalkan⁵⁰ ng dan menuju Batavia(Jakarta) untuk melanjutkan studi di RSH (*Rechtskundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat. Berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935.¹²⁰

¹¹⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 3.

¹¹⁸ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, ketua Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 315.

¹¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*

¹²⁰ *Ibid.*

Setelah memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr), Hazairin menulis disertasi dengan judul *De Renjang* untuk memperoleh gelar Doktor dari pendidikan yang sama.¹²¹ Yaitu mengenai hukum adat istiadat Redjang di Bengkulu.¹²² Dalam penyelesaian disertasi ini, Hazairin dibimbing oleh Ter Haar yaitu seorang pakar hukum adat yang terkenal pada masa itu. Dengan kesabaran dan keuletan akhirnya Hazairin dalam waktu cukup singkat yaitu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya. Disertasinya tersebut berhasil dipertahankannya pada tanggal 29 Mei 1936. Karya inilah yang kemudian mengantarkan Hazairin sebagai ahli hukum adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia.¹²³

Pihak keluarga Hazairin mengatakan bahwa Hazairin menguasai enam bahasa asing yaitu, Belanda, Inggris, dan Prancis secara aktif serta bahasa Arab, Jerman dan Latin secara pasif. Karir hidupnya dimulai sebagai asisten dosen di RHS¹²⁴. Kegiatan ini terhenti setelah ia ditugaskan menjadi pegawai pengadilan di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan,¹²⁵ dan Karesidenan Tapanuli pada tahun 1938-1942. Tugasnya di Padang Sidempuan terus berlanjut walaupun Belanda kemudian digantikan oleh Jepang. Ketika Jepang berkuasa, Hazairin malah diangkat sebagai Penasehat Hukum. Tugas ini dipangkunya sampai Indonesia merdeka, dari tahun 1942 sampai 1945.

¹²¹ Al-Yasa Abu Bakar, *Loc.cit.*

¹²² Tim Grasindo, *Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), h. 263.

¹²³ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*

¹²⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Loc.cit.*

¹²⁵ *Ibid.*

Setelah kemerdekaan, Hazairin terus melanjutkan tugasnya di Tapanuli Selatan. Selama selang waktu enam bulan (Oktober 1945- April 1946), ia menjabat sebagai ketua pengadilan negeri Tapanuli Selatan (Ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Anggota Pemerintahan Tapanuli, Asisten Residen, dan Kepala Luhak. Setelah bertugas di Tapanuli Selatan selama 11 tahun, kemudian Hazairin dipindahkan oleh pemerintahan pusat ke daerah asalnya yaitu Bengkulu. Atas prestasinya, lalu ia dipromosikan menjadi Residen Bengkulu(1946-1950), merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatra Selatan hingga tahun 1953. Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata pada Kementerian Kehakiman tahun 1953.

Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian, Hazairin juga tidak tinggal diam. Dia dan kawan-kawannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota gerakan bawah tanah di zaman Infiltrasi Jepang tahun 1945, kemudian Hazairin bergabung dengan tentara pelajar, baik waktu berada di Tapanuli Selatan maupun ketika di Bengkulu.¹²⁶ Selain itu Hazairin mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai uang kertas “Hazairin”. Uang kertas tersebut digunakan untuk membiayai angkatan perang dan mengatasi kesulitan ekonomi rakyat.¹²⁷

¹²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 53.

¹²⁷ Nur Asiah, *Ensiklopedia pahlawan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprina Media Grafika, 2009), Cet. 1, h. 94.

Hazairin juga pernah dipercaya memegang jabatan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1953 dalam kabinet Ali Sastroamidjojo.¹²⁸ Setelah Hazairin berhenti sebagai Menteri, Hazairin diangkat sebagai Pejabat Tinggi yang diperbantukan pada kementrian kehakiman hingga 1959, dan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan serta sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di berbagai Perguruan Tinggi. Akan tetapi pada akhirnya, Hazairin lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan daripada seorang politisi. Dia menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia(UI). Selain menjadi Guru Besar di UI, Hazairin juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pada tahun 1950 Hazairin mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian namanya di ubah menjadi Universitas Islam Jakarta(UID) yang sekarang. Hazairin dipercaya sebagai ketua Yayasan sekaligus Rektornya di UID. Jabatan ini merupakan jabatan yang terakhirnya hingga sampai ia meninggal dunia.¹²⁹ Selain peranannya dipemerintahan, dia juga berperan serta mewujudkan hukum baru yang mengatur tentang parental, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, dan kecerdasan rakyat. Pemerintah

¹²⁸ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ictiyar Baru Van Hoeve, 1992), Edisi Khusus, Jilid ke 3, h. 1273

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 54-55.

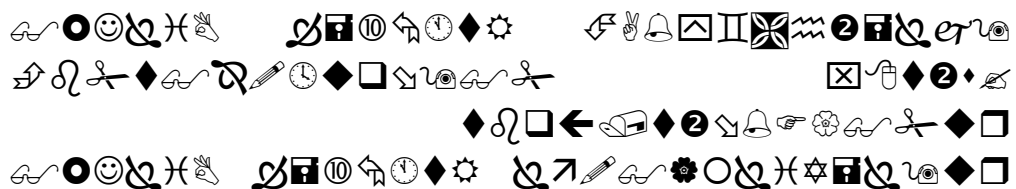
menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional berdasarkan S.K. Presiden RI No. 074/TK/Tahun 1999.¹³⁰

B. Pola Pemahaman Terhadap al-Quran dan Hadits

Dalam menafsirkan al-Quran Hazairin melakukannya secara *al-Haml*, yaitu menafsirkan al-Quran berangkat dari keyakinannya terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan, tentunya serelah mengadakan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan tersebut. Pola pemahaman Hazairin terhadap al-Quran dan Hadits, khususnya dalam persoalan kewarisan berangkat dari penemuannya bahwa masyarakat yang baik adalah bilateral, sistem yang tidak berat sebelah dalam menghubungkan garis keturunan. Sistem bilateral juga dipandang tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama-sama berperan dalam memberikan keturunan pada sebuah keluarga, sehingga menganggap yang satu lebih unggul dari yang lainnya adalah hal yang tidak memenuhi prinsip keadilan.¹³¹

Surat *an-Nisa* ayat 7 adalah contoh nyata dari berbagai jawaban tepat untuk menjelaskan bahwa Islam mendukung sistem kekeluargaan bilateral.¹³²

Yang berbunyi:



¹³⁰ Nur Asiah, *Op.cit*, h. 94.

¹³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 64-65.

¹³² *Ibid*.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.¹³³

Demikian juga Surat an-Nisa ayat 11:

Artinya: “Allah mensyari’atkan(mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, Maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan). dan untuk dua orang ibu-bapa, bagian masing-

¹³³ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia(yang meninggal) mempunyai anak; jika dia(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³⁴

Yaitu menjadikan semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (Ayah dan Ibunya). Ini adalah sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam sistem matrilineal anak tersebut diwarisi oleh ibunya saja dan tidak bapaknya. Dan ayat 11 surat an-Nisa tersebut menjadikan ayah dan ibunya menjadi ahli waris bagi anaknya yang mati purnah. Ini adalah sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal anak itu diwarisi oleh ayah, sedangkan dalam sistem matrilineal anak tersebut diwarisi oleh ibu.¹³⁵

Ayat di atas berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Aus bin Tsabit al-Anshori yang meninggal dunia dengan ahli waris perempuan yaitu, Istri (Ummu Kailan dan tiga orang anak perempuannya. Sepeninggal Aus bin Tsabit datang dua orang anak laki-laki pamannya. Dua orang anak laki-laki pamannya tersebut mengambil harta peninggalan Aus bin Tsabit tanpa menyisakan untuk isteri dan ketiga anak-anak perempuannya. Pada masa jahiliyah yang berhak mewaris adalah orang yang sanggup berpanas dengan mengendarai kuda, bias

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Hazairin, *Op.cit*, h. 14.

memanah, mahir memainkan pedang dan sanggup mendapatkan ghonimah(harta rampasan perang).

Kejadian tersebut dilaporkan oleh Ummu Kaja kepada Rasul Allah. Dua orang laki-laki tersebut dibawa menghadap Rasul Allah. Kemudian laki-laki tersebut berkata:”Anak Ummu Kaja tidak bias mengendarai kuda dan tidak bias pula mengalahkan musuh dalam peperangan. Rasul Allah menjawab: Pergi kamu semua dan tunggu sampai Allah menurunkan ayat yang menceritakan pecahan masalah tersebut. Tak lama kemudian turunlah ayat di atas sebagai jawaban soalan Aus bin Tsabit sekaligus menolak keputusan dua orang laki-laki dan kewarisan model jahiliyah.¹³⁶

Dari kenyataan tersebut Hazairin akhirnya melihat arah muara dari segala adat dan budaya, khususnya dalam sistem kekerabatan yaitu menuju masyarakat yang bilateral. Anggapan Hazairin tersebut bukan tanpa alasan. Argumen yang menjadi dasar pijakannya adalah al-Quran dan Hadits. Adat yang *partikularistik* dihadapkan dengan al-Quran dan Hadits yang universal, adat yang temporer dihadapkan juga dengan al-Quran dan Hadits yang kekal.

Hazairin berkeyakinan bahwa pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup dan tidak seorangpun yang berhak untuk menutupnya. Dengan demikian al-Quran dan Hadits selalu dapat diterjemahkan dan disesuaikan dengan zaman. Pandangan semacam ini bukan menistakan al-Quran dan Hadits tapi justru

¹³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 66.

sebaliknya, menjadikan al-Quran sebagai pedoman yang selalu aktual dan mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan zaman.¹³⁷

C. Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam

Hazairin adalah seorang tokoh yang gigih memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila bangsa Indonesia menggunakan hukum berdasarkan syariat agama, atau setidaknya hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat agama. Hazairin disamping dikenal sebagai pejuang hukum Islam, beliau dikenal sebagai orang yang memberikan kontribusi besar dalam mengendor pintu *ijtihad* yang sudah lama ditutup di Indonesia.

Dalam pandangan Hazairin, *taqlid*(mengikuti) adalah penyebab utama pembekuan pemikiran fikih. Sebab menurut Hazairin, kebekuan pemikiran fikih bukan hanya disebabkan oleh karena hukum fikih diproduksi oleh para teoritis hukum di “belakang meja”, bukan oleh praktisi hukum di lapangan, sehingga kurang dapat merasakan keberagaman tatanan masyarakat yang ada. Akibatnya antara ilmu dan kemajuan teknologi tidak seimbang. Lebih parah lagi para ulama memandang kitab-kitab fikih lebih suci dan sacral yang resistan terhadap segala bentuk perubahan. Sehingga terkesan kitab-kitab fikih karangan karangan ulama abad pertengahan tersebut lebih sakral daripada Quran itu sendiri.¹³⁸

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid.*

Menurut Hazairin pada abad XX orang tidak perlu lagi mendewakan manusia. Oleh karena itu ulama atau orang awam tidak perlu menganggap para *mujtahid* zaman dahulu sebagai Dewa yang tidak mungkin mengalami kesalahan analisa. *Output* yang dihasilkan ulama abad pertengahan dinilai sebagai penemuan yang luar biasa zamannya, dan tentunya sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu. Dengan catatan sesuatu yang baik untuk bangsa arab, belum tentu cocok untuk bangsa Indonesia dan bangsa lain-lainnya, sesuatu yang baik pada zaman tertentu belum tentu baik pada zaman sekarang. Artinya kitab-kitab yang dihasilkan ulama klasik tersebut bersifat partikularistik dan local. Sedangkan al-Quran bersifat global. Dengan anggapan seperti ini, Hazairin berharap agar kelak dari instansi-instansi yang ada di Indonesia dapat melahirkan mujtahid-mujtahid yang relevan dengan zamannya dan konteks masyarakat yang ada.¹³⁹

Sementara itu sebelum masa kemerdekaan, Hazairin juga tampil sebagai penjaga eksistensi hukum Islam di Indonesia. Hal ini terlihat ketika beliau menentang pendapat Snouck Hurgronje dengan teori *Receptie*-nya yaitu teori yang mengatakan bahwa pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat.¹⁴⁰ Teori ini berupaya mengusir keberadaan hukum Islam di Indonesia, dan perlahan-lahan menggerogoti wewenang Peradilan Agama.¹⁴¹ Akan tetapi Hazairin menentang

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1, h. 298.

teori tersebut, dengan mengeluarkan bukunya yang berjudul “Hukum Kekeluargaan Nasional” pada tahun 1963 dengan teori *Receptie exit*.¹⁴² Penentangan Hazairin ini selalu dilancarkan di manapun dia berada dengan menyebutkan teori Snouck Hurgronje itu sebagai teori iblis, karena teori itu berusaha menghalangi berlakunya hukum Islam dan mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Implikasi pemahaman Hazairin tentang fleksibel hukum Islam melahirkan sebuah konsep kewarisan yang bersifat bilateral. Dalam pandangan Hazairin, kewarisan selama ini yang di anut oleh sebagian besar ulama adalah produk ulama arab pada masa abad klasik, dan hidup ditengah-tengah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga output yang dihasilkan tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan yang mengelilinginya. Padahal al-Quran secara keseluruhan menginginkan sistem masyarakat bilateral, sehingga kewarisan Islam juga harus memacu pada sistem kewarisan yang demikian.¹⁴³

D. Sumbangannya terhadap Ilmu Pengatahuan

Hazairin adalah tokoh hukum yang produktif, usia tua baginya bukan penghalang untuk terus berkarya. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Bahkan setahun sebelum

¹⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 72.

¹⁴² Abdul Manan, *Op.cit*, h. 303.

¹⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit*.

meninggal beliau masih mampu menghasilkan sebuah karya yang terakhir *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*.

Sumbangan Hazairin dalam menambah khasanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa karya antara lain di bidang hukum adalah *De Redjang* (Disertasi Doktornya, 1963), *De Gevolgen van de huwelijksontbinding in Zaid Tapanuli* (Akibat perceraian perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).

Dalam kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam Hazairin menulis *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952). Mengenai bahasannya tentang hukum Perkawinan Nasional dapat di lihat dalam karya *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetus gagasan Hazairin tentang *Mazhab Nasional*.

Gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional; Demokrasi Pancasila* (1970), dan *Negara Tanpa Penjara* (1981).

Tak luput pula dari analisis Hazairin mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan Demokrasi Pancasila hingga tegaknya Negara hukum. Bukunya *Demokrasi Pancasila* (1981), menguraikan tentang pengertian Demokrasi Pancasila, kedudukan Piagam Jakarta dalam Tata Hukum Indonesia, serta kedudukan kedaulatan Allah SWT dalam Negara.

Bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1981), merupakan kumpulan hukum adat, fungsi dan tujuan pembinaan hukum dalam Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum. Sementara *Hukum Baru di Indonesia* dan *Ilmu Pengatahuan Islam dan Masyarakat* (1973) merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia. Karyanya yang terakhir adalah *Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974*.

Pemikirannya dalam hal kewarisan Islam dapat ditelusuri dalam bukunya *Hendak Kemana Hukum Islam* (1976), dan *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (1982) yang menguraikan tentang tidak terhibabnya saudara sebagai ahli waris disaat bersama ayah. Hal ini disebabkan oleh pemahamannya tentang *kalalah*. Bahwasanya Saudara baru bisa tampil sebagai ahli waris, apabila pewarisnya meninggal dunia dalam keadaan *kalalah*. *Kalalah* menurut Hazairin adalah keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Hal ini dipertahankannya didalam buku *Pedebatan dalam Seminar Hukum tentang Faraidh* (1963).¹⁴⁴

¹⁴⁴*Ibid.*

BAB IV

KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH

A. Pemikiran Hazairin

Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal disebut dengan ahli waris¹⁴⁵. Menurut Hazairin ahli waris dikategorikan menjadi 3 yaitu *Dzawu al Faraidh*, *Dzawu al-Qarabah* dan *Mawali*¹⁴⁶. *Dzawu al-Faraidh* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Mereka adalah: Anak perempuan yang tidak di damping oleh anak laki-laki, Ibu, Ayah dalam hal ada anak, Duda, Janda, Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal *kalalah*, Saudara perempuan dalam hal *kalalah*¹⁴⁷.

Dzawu al-qarabah ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Mereka adalah: Anak laki-laki, Anak perempuan yang di damping anak laki-laki, Ayah, Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, Saudara perempuan yang di damping saudara laki-laki dalam hal *kalalah*¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Loc.cit.*

¹⁴⁶ Hazairin, *Op.cit*, h. 18

¹⁴⁷ Sajuti Thalib, *Op.cit*, h. 72

¹⁴⁸ *Ibid.*

Adapun kategori yang ketiga yaitu, *mawali* ialah ahli waris pengganti. Ahli waris ini menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikannya itu. Sebab orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan harta warisan tersebut jika dia masih hidup. Tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ia dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, Keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris¹⁴⁹.

Dalam menentukan ahli waris yang akan tampil sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak kewarisan, seseorang itu haruslah berada pada garis pokok keutamaan yang utama¹⁵⁰. Adapun perumusan mengenai kelompok-kelompok keutamaan itu, yakni sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama:
 - a) Anak-anak, laki-laki dan perempuan atau sebagai *dzawu al-faraidh* atau sebagai *dzawu al-qarabah*, beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan.
 - b) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dzawu al-faraidh*.
 - c) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*.
2. Keutamaan kedua:

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Hazairin, *Op.cit*, h. 20

- a) Saudara, laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawu al-faraidh* atau sebagai *dzawu al-qarabah*, berserta *mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*.
 - b) Ibu sebagai *dzawu al-faraidh*.
 - c) Ayah sebagai *dzawu al-qarabah* dalam hal *kalalah*.
 - d) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*.
3. Keutamaan ketiga:
- a) Ibu sebagai *dzaawu al-faraidh*.
 - b) Ayah sebagai *dzawu al-qarabah*.
 - c) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*.
4. Keutamaan keempat:
- a) Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*.
 - b) *Mawali* untuk ibu.
 - c) *Mawali* untuk ayah.¹⁵¹

Saudara sebagai ahli waris berada pada keutamaan kedua. Jika inti kelompok keutamaan pertama tidak ada, yaitu anak atau *mawali* anak (tidak ada). Maka saudara baru bisa tampil sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Saudara sebagai ahli waris diatur oleh Allah, dalam surat *an-Nisa* ayat 12 dan 176¹⁵².

Saudara menurut istilah bahasa arab ialah *Akhun* (saudara laki-laki), *Uhktun* (saudara perempuan), dan *Ihkwatun* (saudara-saudara). Hazairin mendefinisikan kata-kata *Akhun*, *Uhktun* dan *Ihkwatun* adalah Saudara

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sajuti Thalib, *Op.cit*, h. 88.

dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah maupun karena pertalian darah dengan ibu¹⁵³.

Menurut Hazairin ayat 12 dan 176 *an-Nisa* itu meliputi semua macam hubungan persaudaraan terlepas dari diskriminasi apapun juga. Meskipun didalam surat *an-Nisa* ayat 12 dan 176 berbeda cara pembagiannya, hubungan persaudaraan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Hal ini disebabkan oleh peringatan ayat 12 surat *an-Nisa* yang berbunyi “ *Ghaira mudharrin*” yaitu tidak memberi *mudharat*, untuk menolak diskriminasi yang merugikan.¹⁵⁴

Menurut Hazairin ukuran perbedaan antara manusia adalah *taqwa*, di samping ukuran hubungan kekeluargaan dan bertaqwa kepada Allah. Apalagi al-Qur'an mengizinkan poligami, tentu Allah mengetahui apa akibat poligami itu, yaitu adanya saudara seibu, saudara seayah atau saudara kandung. Serta mengetahui juga bahwa perbedaan dalam masyarakat antara kandung dan tiri adalah sumber besar bagi macam-macam kedengkian, kebencian, kecurangan dan permusuhan yang harus di basmi¹⁵⁵.

Dengan demikian perbedaan dasar pembagian antara saudara itu bukan disebabkan oleh perbedaan hubungan persaudaraan tetapi harus dicari sebabnya, yaitu karena keadaan lain¹⁵⁶. Adapun cara pembagian saudara dalam surat *an-Nisa* ayat 12 adalah sebagai berikut:

¹⁵³ Hazairin, *Op.cit*, h. 50.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Moh. Dja'far, *Op.cit*, h. 50.

1. Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara *kalalah* dan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi saudara itu masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.
2. Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara *kalalah* dan baginya ada beberapa orang saudara, semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan, maka semua saudara itu berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalannya. Pembagian tersebut setelah dikeluarkan wasiat dan hutangnya¹⁵⁷

Adapun cara pembagian saudara pada ayat 176 surat an-Nisa adalah sebagai berikut:

1. Jika orang yang mati *kalalah* itu ada baginya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuannya itu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalannya.
2. Jika yang mati *kalalah* itu seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara laki-laki saja (ataupun lebih dari seorang), maka saudara laki-lakinya mewarisinya.
3. Jika yang mati *kalalah* itu ada dua orang saudara perempuan (atau lebih dari dua orang), maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalannya.

¹⁵⁷ Hazairin, *Op.cit*, h. 7-8.

4. Jika yang mati *kalalah* itu ada beberapa saudara (*ikhwatun*), baik laki-laki maupun perempuan, maka pembagian antara mereka ini ialah: seorang laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian perempuan.¹⁵⁸

Adapun tentang perbedaan pembagian dalam kedua ayat 12 dan 176 *an-Nisa*, terletak pada perbedaan keadaan mengenai orang tua si pewaris. Bahwa pada ayat 12 *an-Nisa* ayah masih hidup sebagai ahli waris, sedangkan pada ayat 176 *an-Nisa* ayah tidak ada sebagai ahli waris atau ayah telah meninggal lebih dahulu dari pewaris¹⁵⁹.

Saudara sebagai ahli waris ketika ada ayah, dalam hal ini saudara tetap tampil sebagai ahli waris. Ayah sebagai ahli waris diatur oleh Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 11. Ayah sebagai ahli waris apabila bersama keturunan pewaris, maka ayah berhak mendapatkan warisan sebagai *dzawu al-faraidh*. Sedangkan apabila pewarisnya tidak meninggalkan keturunan, maka ayah tampil sebagai *dzawu al-qarabah*¹⁶⁰. Karena tidak ada faktor yang menghambat saudara tampil sebagai ahli waris disaat adanya ayah sebagai *dzawu al-qarabah*. Ayah si pewaris adalah setaraf dengan ibu si pewaris, sehingga bila ibu ikut mewaris, maka ayah pada prinsipnya harus dapat ikut mewarisi. Kalau ayah tidak berhak menyingkirkan saudara sebagai *dzawu al-faraidh*, maka saudara juga tidak berhak menyingkirkan ayah sebagai *dzawu*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Hzairin, Mahmud Yunus dan Toha Jahja Omar, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 85.

¹⁶⁰ *Ibid.*

al-qarabah, asal saja kemungkinan ada sisa untuk *dzawu al-qarabah*.¹⁶¹ Hal ini disebabkan juga, bahwa saudara hanya dapat dihijab oleh seseorang yang mati punah, artinya pewaris mati dengan tidak meninggalkan keturunan¹⁶²

Hal tersebut sesuai dengan konsep *kalalah* Hazairin. Bahwa saudara sebagai ahli waris baru bisa tampil sebagai ahli waris apabila pewarisnya dalam keadaan *kalalah*. Menurut Hazairin arti *kalalah* telah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 176, yaitu jika seseorang meninggal dunia yang tidak mempunyai "*walad*" (*inimru'un halaka laisa lahu walad*). Kata *walad* dijumpai dalam surat *an-Nisa* ayat 11 yang berbentuk jamak yaitu *awlad*. Seperti dalam bagian kalimat "*fa'in kunna nisa'an*" maka teranglah bahwa arti *walad* setiap macam anak, boleh untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dihubungkan dengan arti *mawali* surat *an-Nisa* ayat 33, maka arti anak mesti pula diperluas dengan keturunan. Sehingga arti *kalalah* selengkapny adalah seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan, baik keturunan dari anak laki-laki maupun keturunan dari anak perempuan¹⁶³.

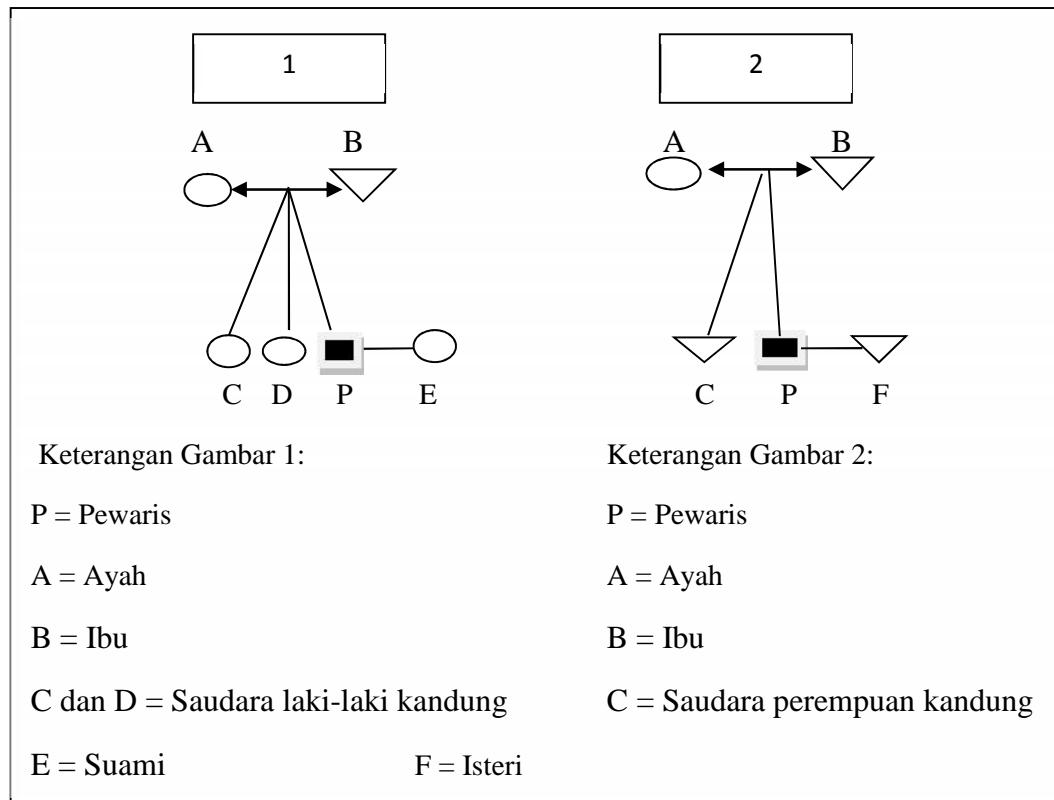
Jadi menurut pemikiran Hazairin bahwa saudara tersebut hanya dapat dihijab oleh anak atau *mawali*-nya, baik dari keturunan anak laki-laki maupun keturunan anak perempuan. hal ini disebabkan konsep *kalalahnya* tersebut.

¹⁶¹ Moh. Dja'far, *Op.cit*, h. 51.

¹⁶² Hazairin, *Loc.cit*.

¹⁶³ Hazairin, *Loc.cit*.

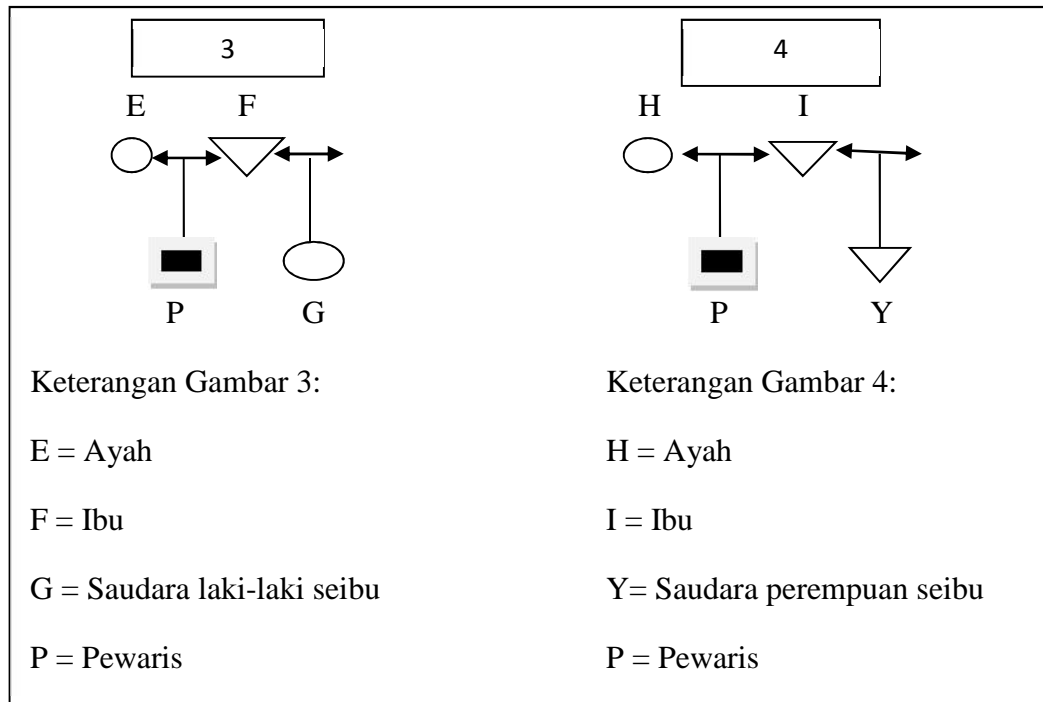
Untuk mudahnya gambar berikut akan menjelaskan posisi ayah dalam kasus *kalalah* yang dijelaskan dalam surat *An-Nisa'*: 12



Pada gambar 1, **A** sebagai *dzawu al-qarabah* tidak mendapat bagian, karena harta habis setelah dibagikan kepada **B** = $\frac{1}{6}$, kepada **E** = $\frac{1}{2}$ dan kepada **C** dan **D** = $\frac{1}{3}$, adapun pembagian **C** dan **D** ini haruslah berbanding 1:1 dalam hal $\frac{1}{3}$ tersebut. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi adalah Rp. 24.000.000, maka **B** mendapatkan Rp. 4.000.000, **C** dan **D** mendapatkan Rp. 8.000.000, (jika di berikan kepada masing-masing, maka **C** mendapatkan Rp.4.000.000, dan **D** mendapatkan Rp. 4.000.000,) dan **E** mendapatkan Rp. 12.000.000,.

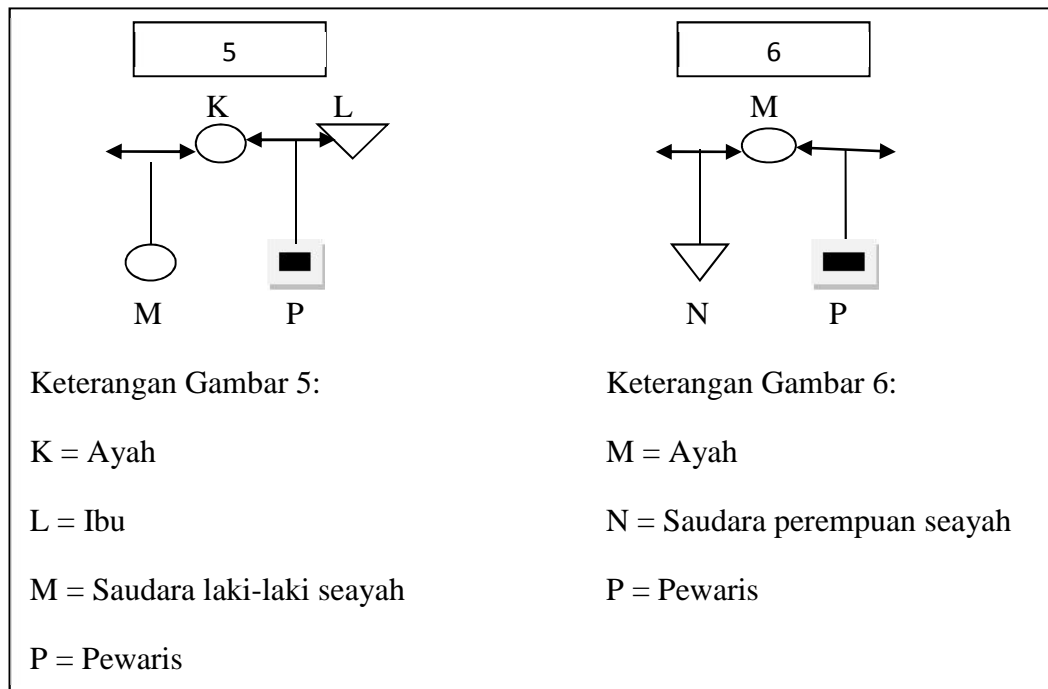
Pada gambar 2, **A** mendapat sisa yaitu $\frac{1}{4}$ setelah diberikan kepada **B** = $\frac{1}{6}$, kepada **C** = $\frac{1}{6}$ dan kepada **F** = $\frac{1}{4}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi Rp. 24.000.000, maka **A** mendapatkan Rp. 6.000.000, **B** mendapatkan

Rp. 4.000.000, **C** mendapatkan Rp. 8.000.000, dan **F** mendapatkan Rp. 6.000.000.



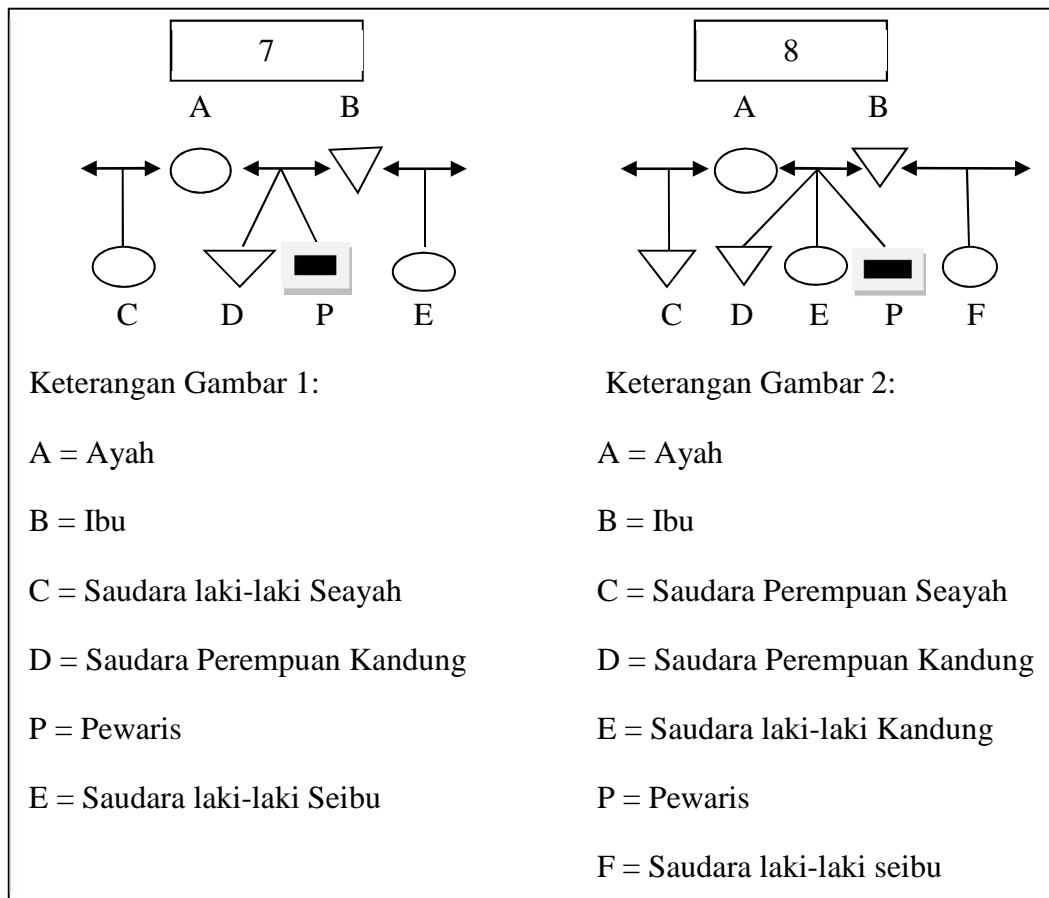
Pada gambar 3, **F** mendapatkan $\frac{1}{6}$, **G** mendapatkan $\frac{1}{6}$, **E** mendapatkan sisa sebagai *dzawu al-qarabah* yaitu $\frac{4}{6}$. Bila harta itu terdiri dari uang Rp. 90.000, maka **F** mendapatkan Rp. 15.000, **G** mendapatkan Rp. 15.000, dan **E** mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, setelah diberikan lebih dahulu kepada **F** dan **G**.

Pada gambar 4, **I** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, **Y** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, dan **H** mendapatkan sisa sebagai *dzawu al-qarabah* yaitu $\frac{4}{6}$. Bila harta peninggalan itu terdiri dari tanah seluas 12 ha. Maka **H** mendapatkan 8 ha, **Y** mendapatkan 2 ha dan **I** mendapatkan 2 h.



mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan **K** mendapatkan sisa yaitu $\frac{4}{6}$ sebagai *dzawu al-qarabah*. Jika diumpamakan harta tersebut bernilai uang Rp. 24.000.000, Maka **K** mendapatkan Rp. 16.000.000, **L** mendapatkan Rp. 4.000.000, dan **M** mendapatkan Rp. 4.000.000,.

Adapun pada gambar 6, **N** mendapatkan bagiannya $\frac{1}{6}$. Adapun **M** (Ayah) mendapatkan sisa setelah di berikan kepada **N** terlebih dahulu, yaitu sebanyak $\frac{5}{6}$ dari harta peninggalan tersebut. Jika harta itu terdiri dari tanah 24 ha. Maka **M** mendapatkan 20 ha, sedangkan **N** mendapatkan 4 ha.



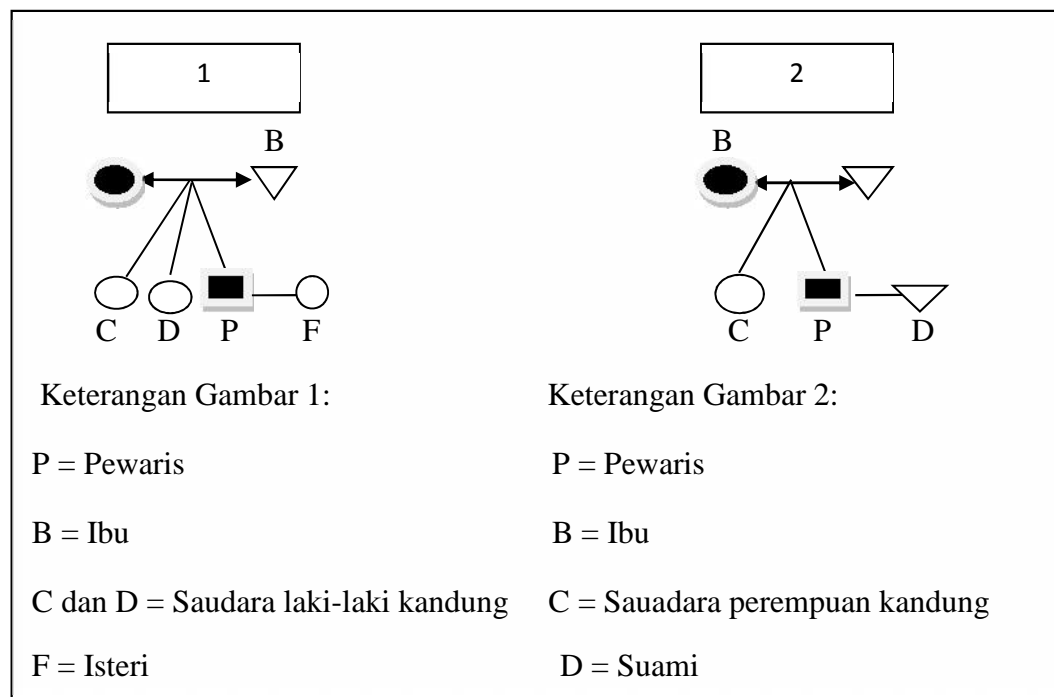
Dalam pembagian gambar 7 di atas, maka **A** sebagai *dzawu al-qarabah* mendapatkan $\frac{3}{6}$, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dan C, D dan E mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ dari harta, dan diantara mereka berbanding 1:1:1. Maka jika diumpamakan seluruh harta yang akan dibagi berbentuk tanah seluas 18 ha, maka **A** mendapatkan 9 ha, **B** mendapatkan 3 ha, sedangkan **C**, **D** dan **E** mendapatkan 6 ha. Jika diberikan kepada masing-masing (C, D dan E), maka **C** mendapatkan 2 ha, **D** mendapatkan 2 ha dan **E** mendapatkan 2 ha.

Adapun dalam pembagian gambar 8, maka **A** sebagai *dzawu al-qarabah* mendapatkan bagian $\frac{3}{6}$, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, **C**, **D**, **E** dan **F** berserikat dalam bagian $\frac{2}{6}$. Jika diumpamakan harta berbentuk tanah seluas 24 ha, maka **A** mendapatkan bagian 12 ha, **B** mendapatkan bagian 4 ha, **C**, **D**, **E**

dan **F** mendapatkan bagian 8 ha (jika dibagikan kepada **C D E F**, maka mereka mendapatkan bagian 2 ha masing-masing).

Lain halnya kasus *kalalah* (Q.S. An-Nisa : 176), disini saudara berfungsi sebagai *dzawu al-qarabah*, seperti si mati meninggalkan seorang saudara laki-laki atau beberapa orang saudara laki-laki, atau saudara perempuan yang disertai saudara laki-laki. Letak perbedaan surat *An-Nisa*: 176 ini bahwa yang mati *kalalah* ini tidak meninggalkan ayah¹⁶⁴.

Untuk mudahnya gambar berikut ini akan menjelaskan mengenai *kalalah* dalam surat *An-Nisa*: 176 yang ayahnya sudah tidak ada:

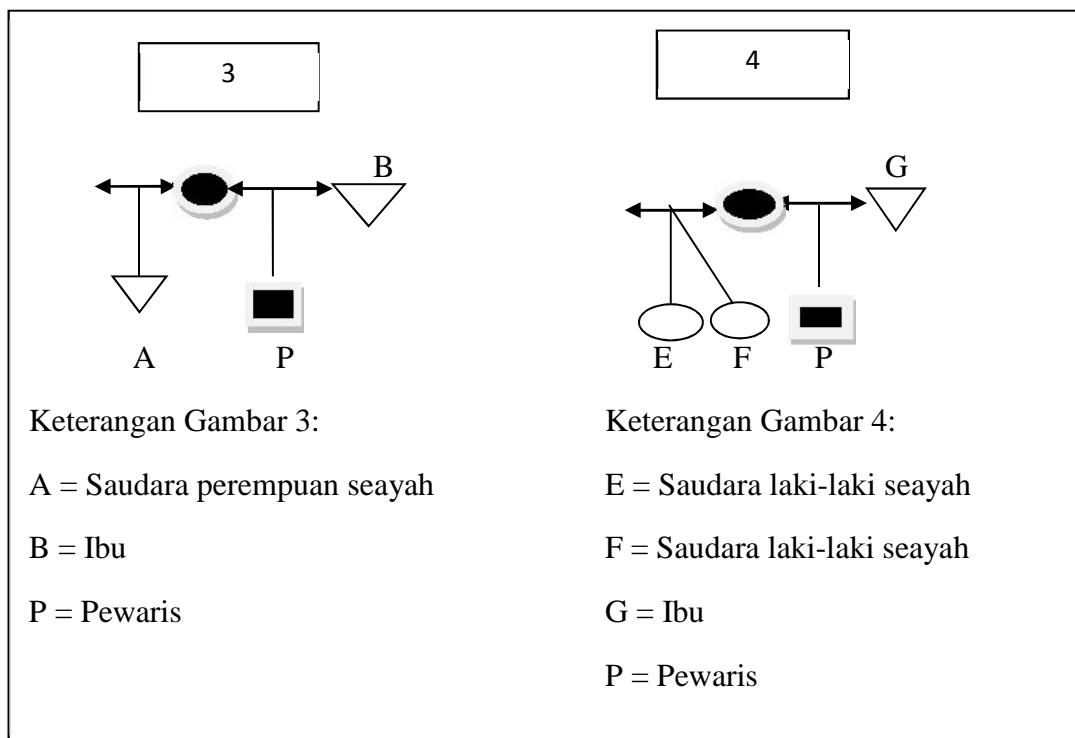


Pada gambar 1, **B**(ibu)mendapat 1/6, **F**(isteri) mendapat 1/4, **C** dan **D**(saudara laki-laki kandung) mendapatkan sisa sebagai *dzawu al-qarabah*

¹⁶⁴ Moh. Dja'far, *Op.cit*, h. 52-53.

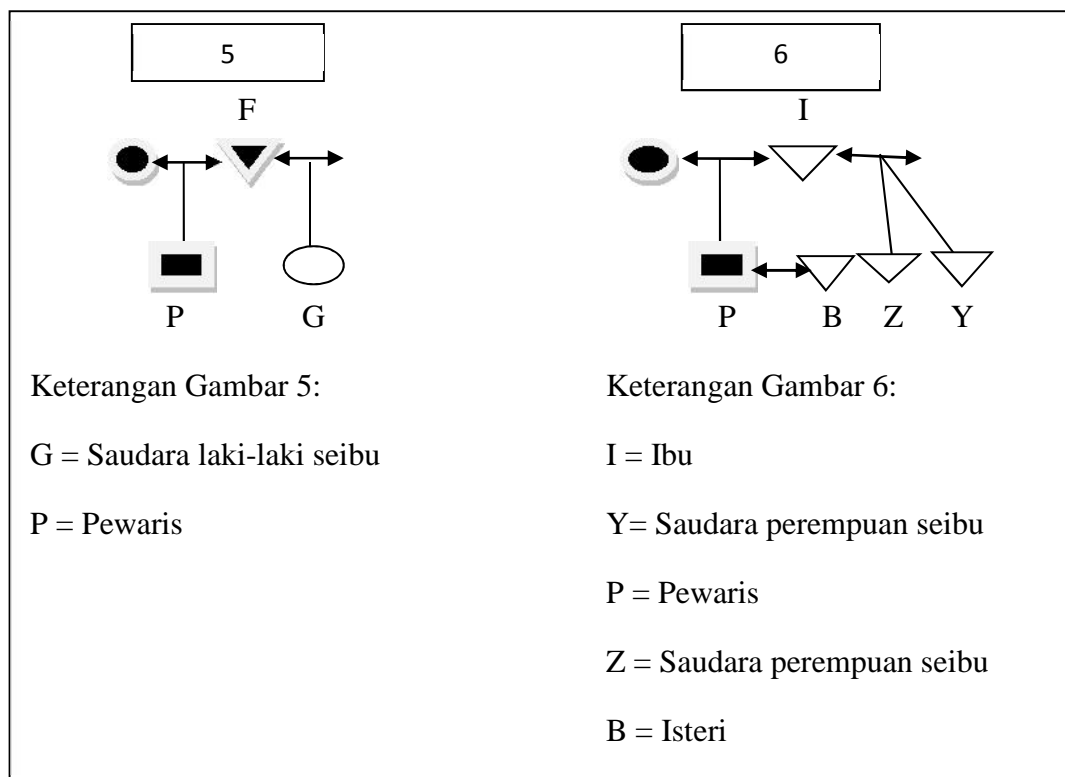
yaitu $\frac{7}{12}$ yang masing-masing mendapatkan $\frac{7}{24}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi Rp. 12.000.000, maka **B** mendapatkan harta Rp. 2.000.000, **F** mendapatkan Rp. 3.000.000, dan **C** dan **D** mendapatkan harta Rp. 7.000.000, (maka **C** mendapatkan Rp. 3.500.000, dan **D** mendapatkan Rp. 3.500.000,)

Pada gambar 2, **B**(ibu)mendapat $\frac{1}{6}$, **E** (suami)mendapat $\frac{1}{2}$ sedang **C** (saudara perempuan kandung)mendapatkan $\frac{1}{2}$. Dalam kasus ini terdapat, ahli waris yang mungkin akan terabaikan sahamnya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya bahwa kekurangan itu harus dipikul oleh semua ahli waris yang berhak sesuai dengan saham mereka. Aplikasinya penyebut dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan pembilang. Maka **A** mendapatkan $\frac{3}{7}$, **B** mendapatkan $\frac{1}{7}$ dan **C** mendapatkan $\frac{3}{7}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi ssebentuk tanah seluas 21 ha. Maka **A** mendapatkan tanah seluas 9 ha, **B** mendapatkan tanah seluas 3 ha dan **C** mendapatkan tanah seluas 9 ha.



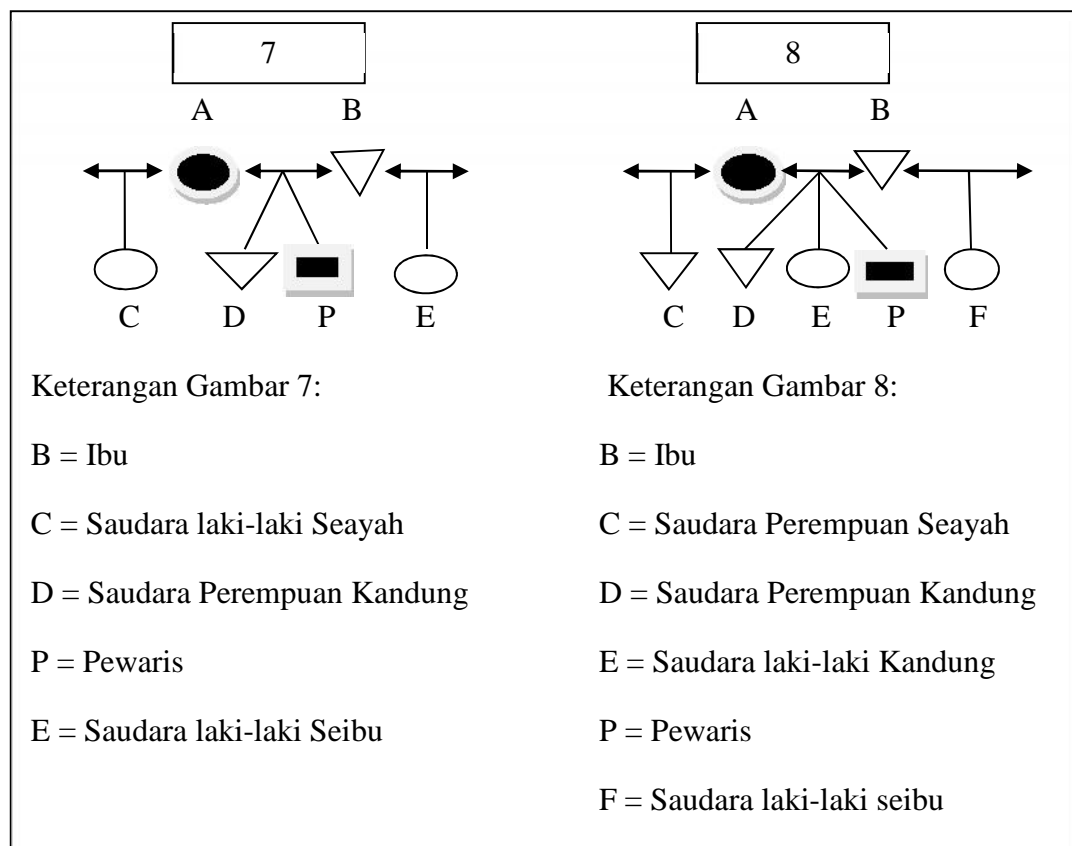
Pada kasus gambar 3, **A** mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Dalam kasus ini, harta berlebih $\frac{2}{6}$. Maka $\frac{2}{6}$ ini diuraikan kepada **A** dan **B** berbanding 3:1. Jadi **A** mendapatkan harta $\frac{18}{24}$ dan **B** mendapatkan $\frac{6}{24}$. Jika diumpamakan hartanya Rp. 48.000.000, maka **A** mendapatkan Rp.36.000.000, dan **B** mendapatkan Rp. 12.000.000,.

Pada gambar ke 4, **G** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, sedangkan **E** dan **F** mendapatkan bagian sisa yaitu $\frac{5}{6}$, mereka harus berbanding 1:1 dalam $\frac{5}{6}$ harta tersebut. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi itu sebesar Rp. 6.000.000, maka **G** mendapatkan Rp. 1.000.000, dan **E** dan **F** mendapatkan Rp. 5.000.000, jika di serahkan kepada **E** dia akan mendapatkan Rp.2.500.000, dan **F** mendapatkan Rp. 2.500.000,.



Pada gambar kasus 5 di atas, ahli waris yang tampil adalah **G**. Maka **G** sebagai ahli waris mendapatkan hak kewarisannya seluruh harta yang akan dibagikan.

Adapun pada kasus gambar ke 6, **I** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Sedangkan **Y** dan **Z**, mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta dan antara mereka harus berbanding 1:1. **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Jadi dalam kasus ini terjadilah aul. Maka penyelesaiannya adalah **I** mendapatkan $\frac{2}{13}$, **Y** dan **Z** mendapatkan bagian $\frac{8}{13}$ dan mereka harus berbanding 1:1 dalam $\frac{8}{13}$ tersebut, **B** mendapatkan bagian $\frac{3}{13}$. Jika diumpamakan harta tersebut bernilai 39 ha tanah. Maka **I** mendapatkan 6 ha, **B** mendapatkan bagian 9 ha, adapun **Y** dan **Z** mendapatkan 24 ha. Jika dibeikan kepada masing-masing, maka **Y** mendapatkan bagian 12 ha dan **Z** mendapatkan bagian 12 ha juga.

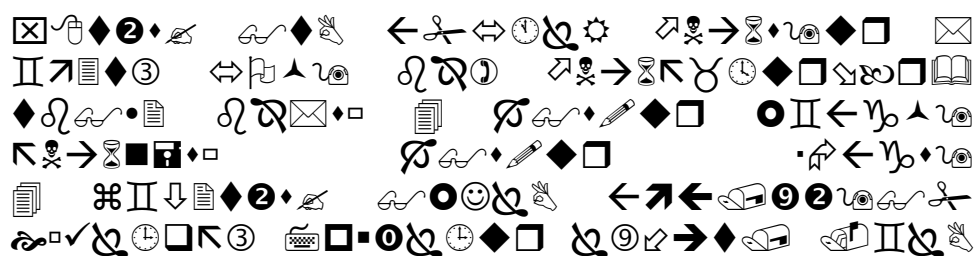


sebanyak Rp. 24.000.000, maka **A** mendapatkan bagian Rp. 6.000.000, adapun **C**, **D** dan **E** mendapatkan bagian Rp. 18.000.000, dalam pembagian masing-masing **C** mendapatkan Rp. 7.200.000, **D** mendapatkan bagian Rp. 3.600.000, **E** mendapatkan bagian Rp. 7.200.000,.

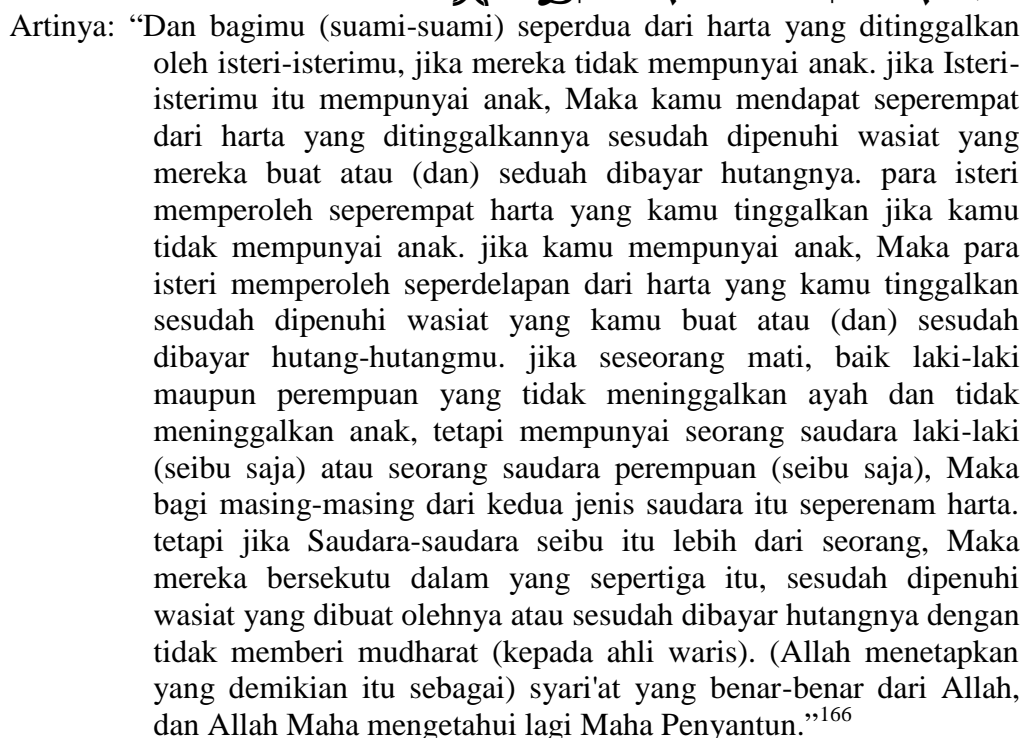
Adapun pembagian dalam gambar 8, maka **B** mendapatkan bagian 1/6, **C**, **D**, **E**, **F** mendapatkan bagian sebagai *dzawu al-qarabah* dalam hal 5/6. Di antara mereka haruslah berbanding 1:1:2:2. Jika harta yang akan dibagi sebanyak 18 ha maka **B** mendapatkan bagian 3 ha, **C** mendapatkan 2.5 ha, **D** mendapatkan bagian 2.5 ha, **E** mendapatkan bagian 5 ha dan **F** mendapatkan bagian 5 ha.

B. Pemikiran Hazairin Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Menurut pemikiran Hazairin bahwa saudara yang dimaksud ayat 12 dan 176 *an-Nisa* adalah semua hubungan persaudaraan, baik saudara seibu, saudara kandung atau saudara seayah. Adapun alasan Hazairin menyamakan hubungan persaudaraan tersebut disebabkan adanya peringatan pada ayat 12 *an-Nisa* yang berbunyi “*Ghaira Mudharrin*” yaitu tidak memberi *mudharat* untuk menolak diskriminasi yang merugikan¹⁶⁵. Ayat 12 *an-Nisa* tersebut berbunyi:



¹⁶⁵ *Ibid.*

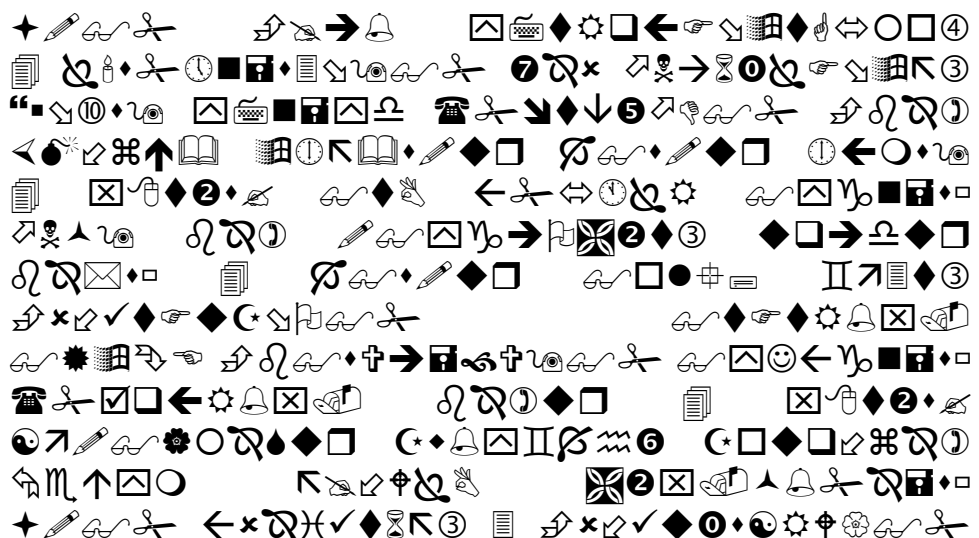


166

Dalam hal menyamakan hubungan persaudaraan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Para ahli hukum menjelaskan bahwa saudara yang dimaksud dalam ayat 12 surat an-Nisa adalah saudara seibu hal ini disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Bagian yang didapat oleh saudara-saudara itu sama dengan bagian ibu, yaitu 1/6 atau 1/3.
2. Hubungannya dengan pewaris melalui ibu, sehingga bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan sama rata, bukan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
3. Penafsiran al-Qurtuby dan Rasyid Ridha mengenai surat an-Nisa ayat 12 bahwa telah sepakat para sahabat dan para ulama tentang saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini adalah saudara seibu¹⁶⁷.

Adapun pada ayat 176 surat an-Nisa juga tidak dijelaskan bahwa saudara-saudara ini sekandung atau seayah, ayat tersebut berbunyi:



¹⁶⁷ Moh. Dja'far, *Op.cit*, h. 73



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶⁸

Para ahli hukum menjelaskan bahwa pada ayat 176 tersebut menjelaskan hubungan saudara sekandung atau seayah, dengan alasan sebagai berikut:

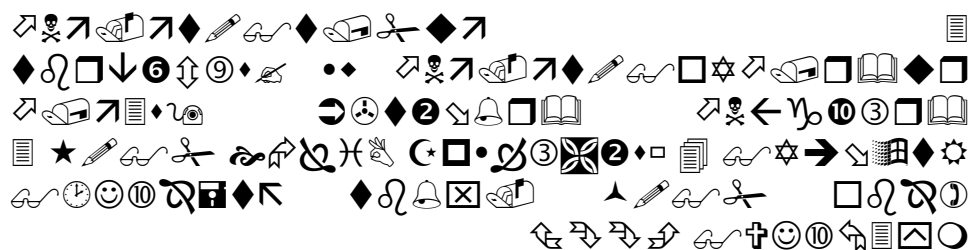
1. Bahwa saudara seibu sudah ditentukan dalam surat an-Nisa ayat 12, maka surat an-Nisa ayat 176 ini menentukan bagian saudara kandung atau seayah.
2. Saudara-saudara itu menempati kedudukan ayah yang telah meninggal, sehingga bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan. hal ini logis, mengingat jika si pewaris hanya meninggalkan ibu dan ayah saja, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 sedangkan ayah mendapat 2/3, yaitu bagian laki-laki (ayah) dua kali bagian perempuan (ibu)¹⁶⁹.

Menurut Hazairin, saudara sebagai ahli waris ketika ada ayah, saudara juga dapat tampil sebagai ahli waris. Bahwa tidak ada faktor yang

¹⁶⁸ Departemen Agama, *Loc.cit.*

¹⁶⁹ Moh. Dja'far, *Op.cit.* h. 74

menghambat ayah ikut sebagai *dzawu al-qarabah*, dan tidak ada pula yang menghambat saudara sebagai *dzawu al-faraidh* (ketika ada ayah)¹⁷⁰. Hal ini disebabkan bahwa yang dapat menghijab saudara adalah seseorang yang mati dengan tidak meninggalkan keturunan baik dari laki-laki maupun dari perempuan¹⁷¹. Hal tersebut juga bertentangan dengan Hukum Islam. Saudara sebagai ahli waris menurut Hukum Kewarisan Islam, bahwa ia akan terhijab apabila ada bersama ayah. Hal ini disebabkan arti “*walad*” yang terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 176 tersebut diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat *an-Nisa*, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak. Ayat tersebut berbunyi:



Artinya: *(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

¹⁷⁰ Hazairin, *Loc.cit.*

¹⁷¹ Hazairin, Mahmud Yunus dan Toha Jahja Omar, *Loc.cit.*

¹⁷² Departemen Agama, *Loc.cit.*

Serta dalam hal ayah menghibah saudara dapat juga dilihat dari *asbabun nuzul* ayat 176 surat an-Nisa. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ayat 176 an-Nisa ini turun ketika sahabat Nabi SAW., Jabir Ibn ‘Abdillah yang sedang sakit keras dikunjungi oleh Rasul Allah,¹⁷³ yang berbunyi:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَنَوَضًا فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضْؤِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا يَرُدُّ
كَالَالَةً. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)
قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ.¹⁷⁴

Artinya: Jabir bin Abdillah r.a. mengatakan bahwa Rasul Allah mengunjunginya ketika ia sakit dan tidak sadar. Lalu orang-orang menuangkan bekas air whudu beliau kepadanya sehingga ia sadar. Kemudian ia katakan, “ Ya Rasul Allah! Yang akan mewarisi saya hanyalah *kalalah*”. Maka turunlah ayat tentang waris, yakni surat an-Nisa ayat 176.

Dari riwayat ini terlihat bahwa yang diuraikan oleh ayat 176 ini dan menjadi sebab turunnya adalah kasus bila seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah, yang ada hanya saudara-saudara perempuan yang asalnya se-*ashabah* dengan dia. Sehingga bila ayat ini tidak menyebutkan ayah, tetapi anak maka itu wajar saja. Karena dari sebab turunnya telah jelas bahwa ketetapan hukum yang ditanyakan di sini dalam kasus bila ayah telah dulu meninggal dunia¹⁷⁵.

Adapun mengenai pemikiran Hazairin tentang saudara dapat tampil apabila dalam keadaan *kalalah*, yaitu mengenai anak perempuan atau cucu

¹⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2, h. 685

¹⁷⁴ Al-Albani, M. Nashiruddin, *Loc.cit.*

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Op.cit.*, h. 69

perempuan dapat menghalangi saudara tampil sebagai ahli waris yang terdapat pada ayat 176 *an-Nisa*¹⁷⁶. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Karena menurut Hukum Kewarisan Islam, bahwa anak perempuan atau cucu perempuan tidak bisa menghalangi saudara tampil sebagai ahli waris. Alasannya bahwa sebagaimana hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله قال جاءت المراءة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول ص م الى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو

177 .

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata ia: Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang hukum kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untuk kamu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat, bahwasanya penulis sependapat dengan Hukum Kewarisan Islam. Dalam ayat 12 dan 176 Allah tidak menjelaskan jenis hubungan persaudaraan, yang kemudian ahli hukum menetapkan berdasarkan penalarannya bahwa ayat 12 surat *an-Nisa*

¹⁷⁶ Hazairin, *Loc.cit.*

¹⁷⁷ Daud, Abu , *Op.cit*, h. 109

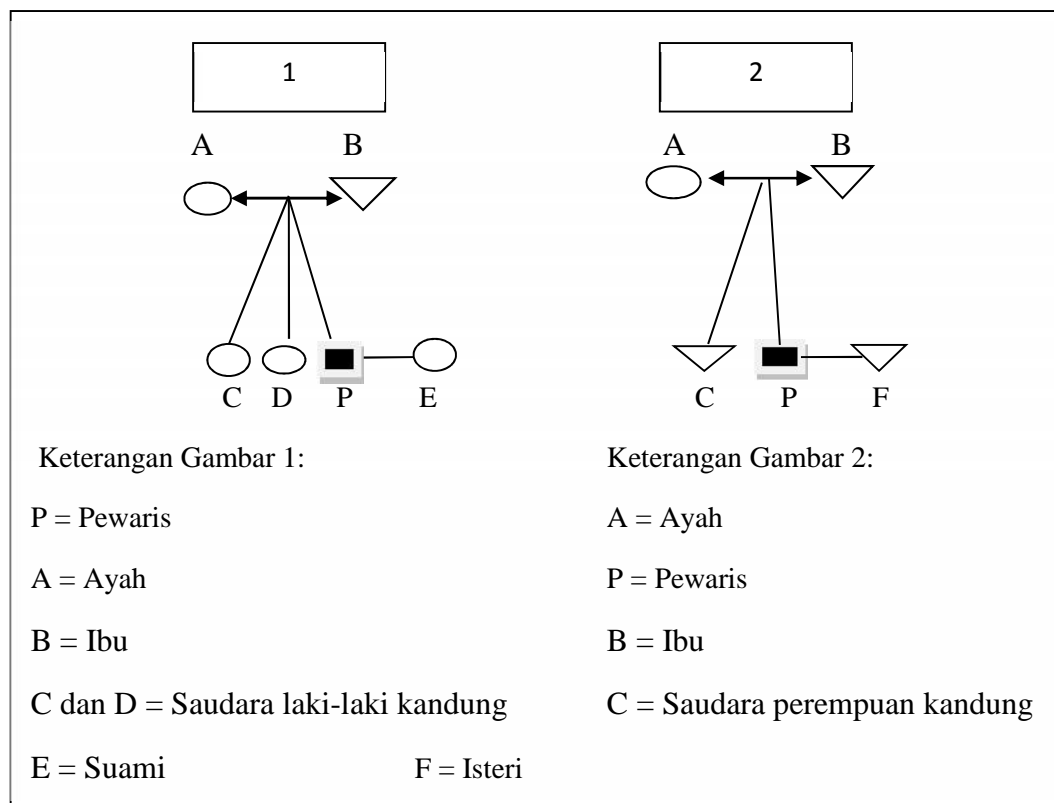
adalah saudara seibu dan ayat 176 surat *an-Nisa* adalah saudara kandung atau seayah yang didasarkan oleh kesamaan *faraidh*-nya. Hal ini sangat logis, karena dalam pembagaian hak kewarisan ayat 12 surat *an-Nisa* tersebut sama dengan pembagian yang diberikan kepada ibu. Adapun pembagaian dalam ayat 176 surat *an-Nisa* yaitu, bahwa saudara seibu telah diatur dala ayat 12 surat *an-Nisa* maka pada ata 176 surat *an-Nisa* ini menentukan bagian bagi saudara kandung atau seayah, serta saudara sebagai ahli waris menempati kedudukan ayah yang telah meninggal dunia. Sehingga bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan. hal ini sangat logis, jika pewaris hanya meninggalkan ayah dan ibu. Maka dicontohkan ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$.

Adapun mengenai terhibabnya saudara oleh ayah menurut Hukum Islam juga sangat sesuai dengan maksud isi dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan arti "*walad*" yang terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 176 tersebut diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat *an-Nisa*, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak. Serta dapat dilihat juga *asbabun nuzul* ayat 176 surat *an-Nisa*.

Juga dalam hal saudara perempuan dan keturunan dari perempuan tidak menghibab saudara sebagai ahli waris menurut Hukum Islam, penulis juga sependapat. Bahwa anak perempuan atau cucu perempuan tidak bisa menghibab saudara tampil sebagai ahli waris. Alasanya sebagaimana hadits dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad di

atas, telah menunjukkan bahwa kehadiran 2 orang anak perempuan tidak menghijab saudara tampil sebagai ahli waris.

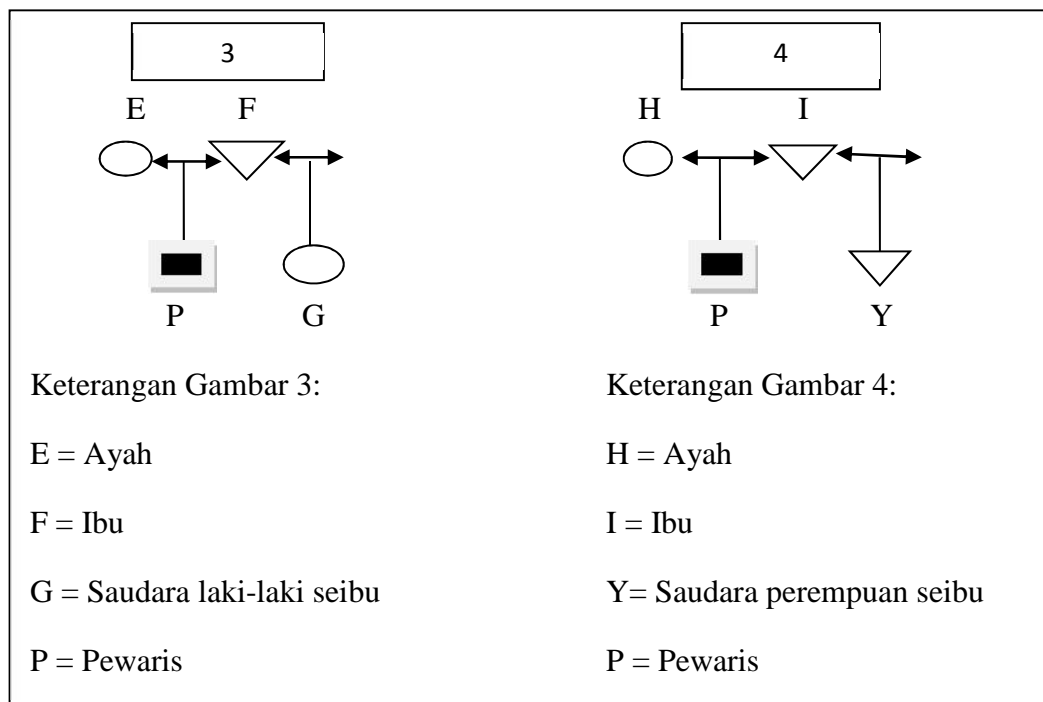
Sebagai ilustrasi dari pendapat *ahlu sunnah* yang berbeda dalam pembagian Hazairin mengenai ayat 12 *an-Nisa* dapat dicontohkan sebagai berikut:



Pembagian ahli waris pada gambar 1, **A** (ayah) mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dan ditambah sisa atau $\frac{2}{6}$, **B** (Ibu) $\frac{1}{6}$, **E** mendapatkan $\frac{1}{2}$. Adapun **C** dan **D** tidak mendapatkan harta warisan disebabkan mereka terhijab oleh adanya ayah. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi itu sebetuk tanah

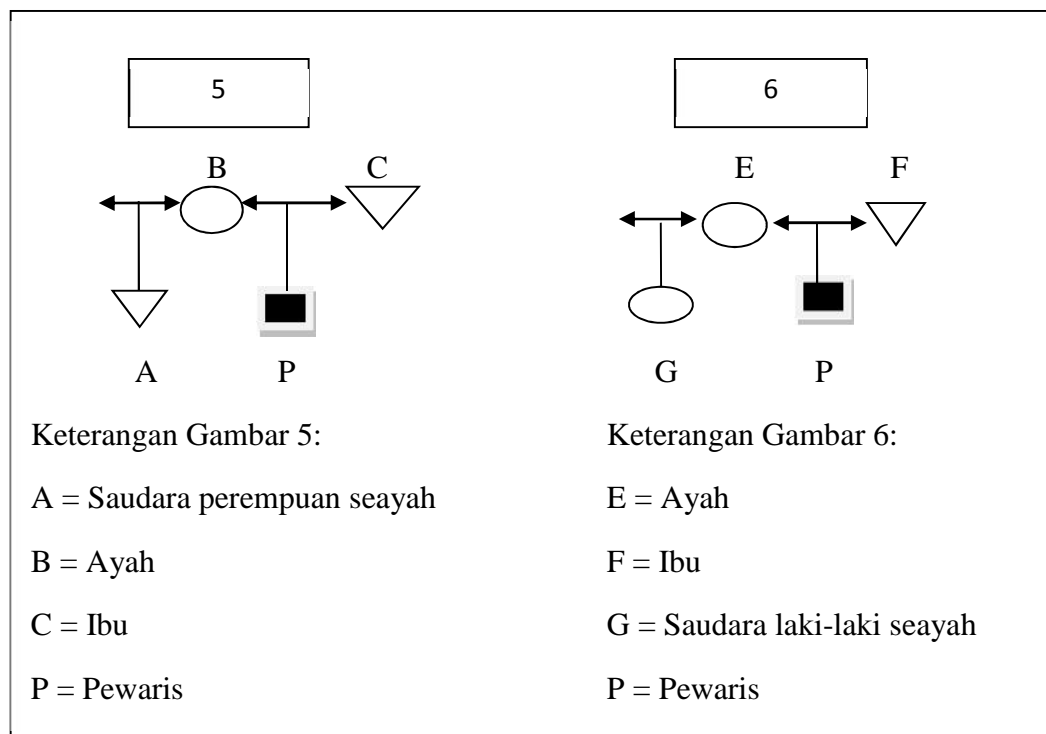
seluas 12 ha. Maka **A** mendapatkan 4 ha, **B** mendapatkan bagian 2 ha dan **E** mendapatkan 6 ha.

Adapun dalam pembagian pada gambar ke 2, **A** mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan sisa yaitu $\frac{5}{12}$, **B** mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{4}{12}$ atau $\frac{2}{6}$ dan **F** mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi sebanyak Rp. 12.000.000, maka **A** mendapatkan Rp.5.000.000, **B** mendapatkan Rp. 4.000.000, dan **F** mendapatkan Rp. 3.000.000,.



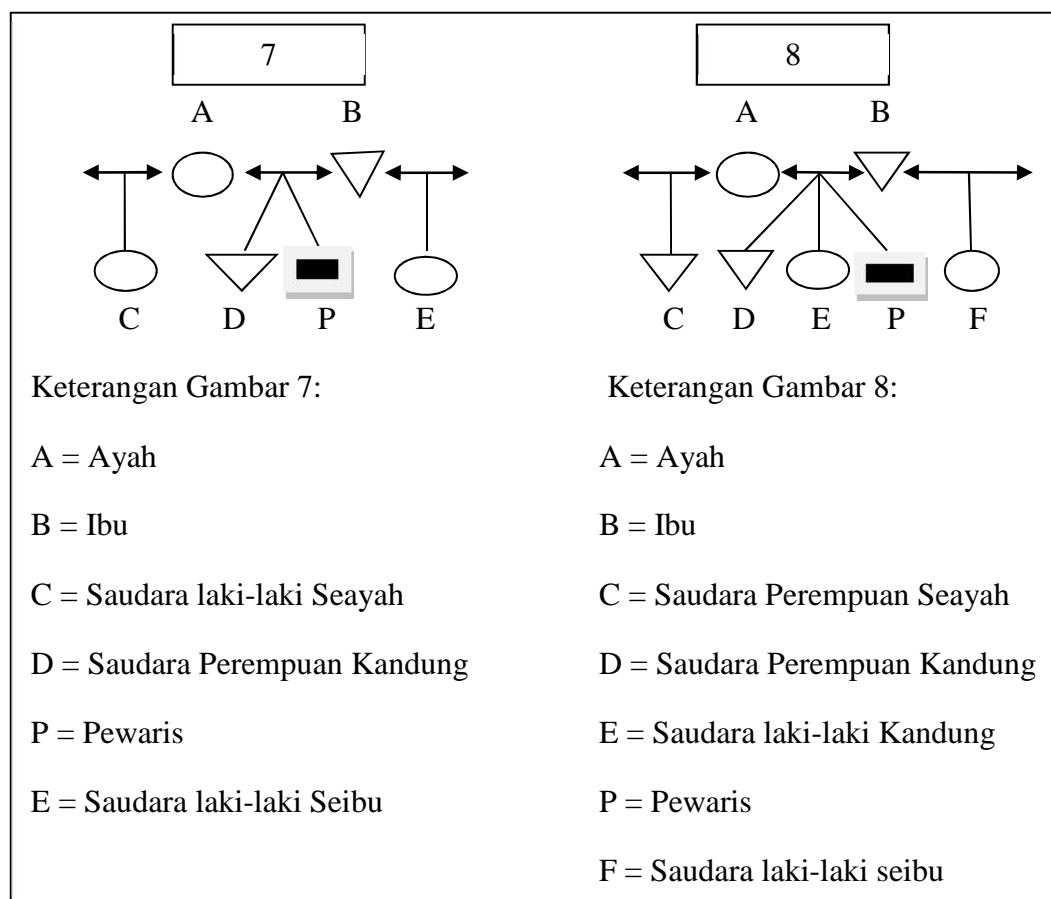
Pada kasus gambar 3, **E** mendapatkan bagiannya $\frac{1}{6}$ dan ditambah sisa atau $\frac{8}{12}$ atau $\frac{4}{6}$ atau $\frac{2}{3}$, **F** mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{4}{12}$ atau $\frac{2}{6}$. Adapun **G** terhibab oleh adanya ayah. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi adalah Rp. 12.000.000, maka **E** mendapatkan Rp. 8.000.000, dan **F** mendapatkan Rp. 4.000.000,.

Adapun pada kasus gambar ke 4, dalam pembagian ahli warisnya sama dengan kasus no 3 di atas. Adapun **Y** atau Saudara perempuan seibu sebagai ahli waris tetap terhibab oleh ayah.



Dari kasus gambar 5 di atas, **A** sebagai ahli waris terhibab oleh adanya **B**. **B** sebagai ahli waris mendapatkan bagiannya $\frac{1}{6}$ dan sisa atau $\frac{8}{12}$ atau $\frac{4}{6}$ atau $\frac{2}{3}$. Adapun **C** mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{4}{12}$ atau $\frac{2}{6}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi adalah sebetuk tanah 12 ha, maka **A** mendapatkan bagian 8 ha tanah dan **B** mendapatkan 4 ha tanah.

Pada kasus gambar 6, dalam hal pembagiannya juga sama dengan pembagian gambar 1. **H** dan **G** juga terhibab oleh adanya **E**.

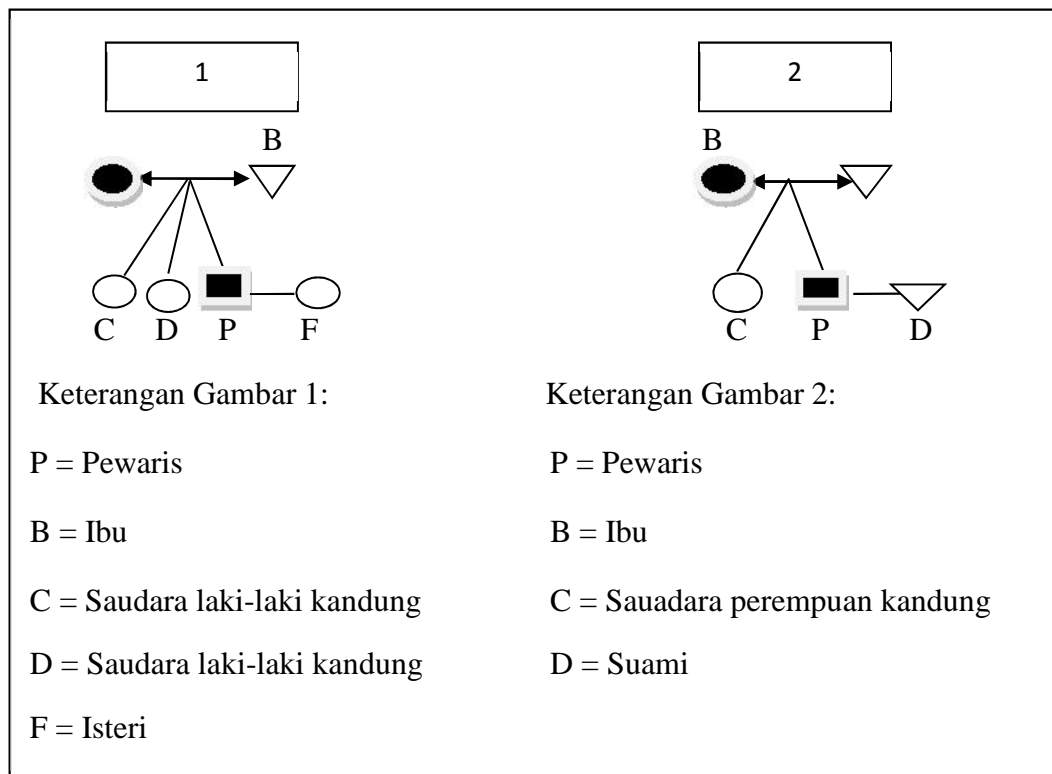


Adapun pada gambar 7 di atas maka **A** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ditambah sisa yaitu $\frac{5}{6}$, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Adapun **C**, **D** dan **E** mereka terhibab di sebabkan adanya **A**. jika diumpamakan harta yang akan

dibagikan adalah Rp. 6.000.000, maka **A** mendapatkan bagian Rp. 5.000.000, **B** mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,.

Adapun pada gambar ke-8, baik dalam pembagian dan yang terhibab juga sama dengan kasus no. 7 di atas.

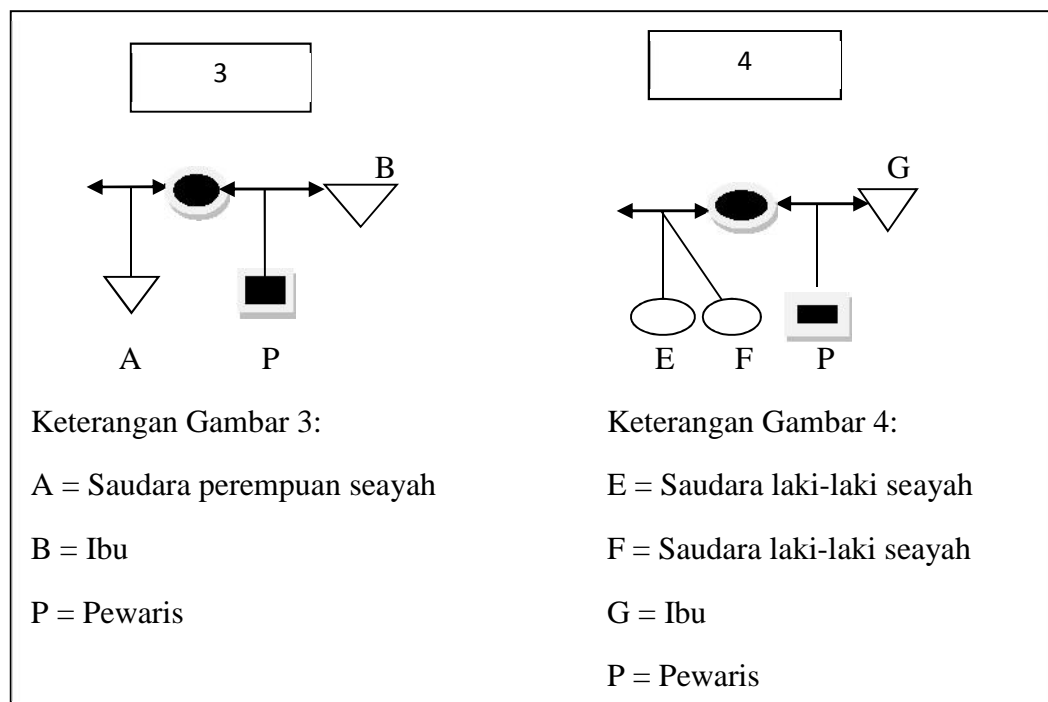
Sedangkan ilustrasi dari contoh Hazairin pada ayat 176 an-Nisa menurut *ahlus Sunnah* adalah sebagai berikut:



Pada gambar 1, **B** sebagai ahli waris mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{12}$, **F** mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ dan **C** dan **D** mendapatkan bagian sebagai *ashabah* atau sisa yaitu $\frac{7}{12}$ dan mereka harus berbanding 1:1. Jika diumpamakan harta yang akan dibagikan sebetuk tanah seluas 12 ha, maka **B**

mendapatkan bagian 2 ha, **F** mendapatkan bagian 3 ha dan **C** dan **D** mendapatkan bagian 7 ha, maka masing-masing mereka mendapatkan bagian **C** adalah 3.5 ha dan **D** adalah 3.5 ha juga.

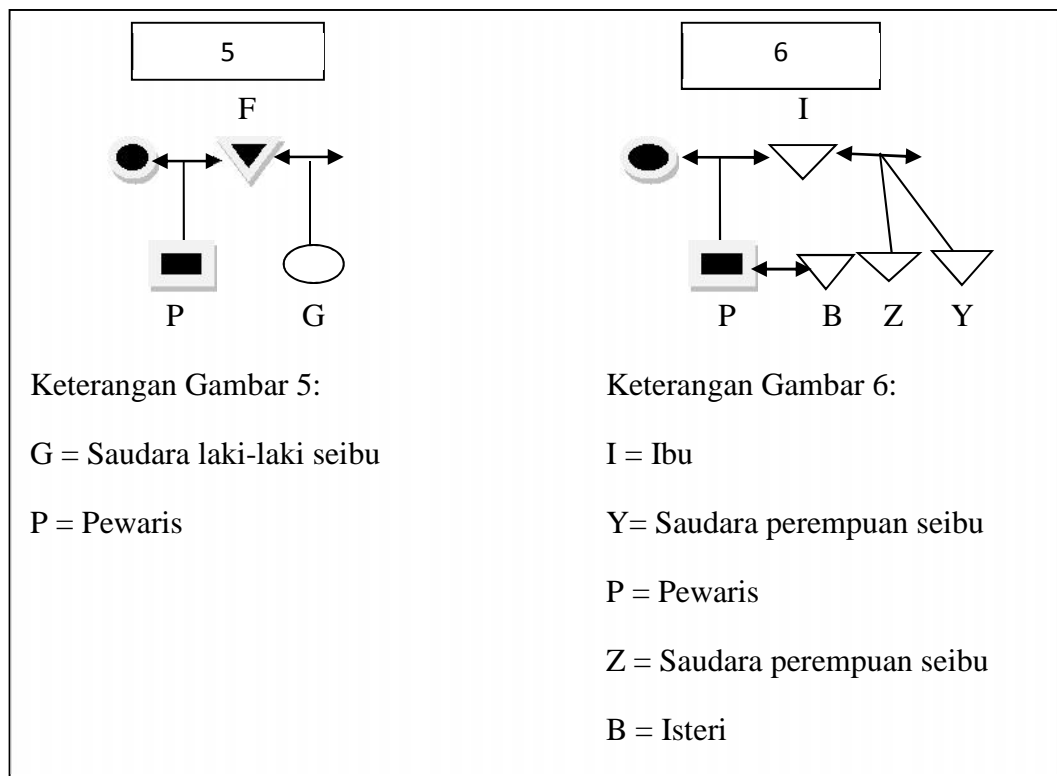
Pada gambar 2, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$, **C** mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan **D** mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$. Dalam kasus ini terjadilah aul. Maka **B** mendapatkan bagian $\frac{4}{16}$, **C** mendapatkan bagian $\frac{6}{16}$ dan **D** mendapatkan bagian $\frac{6}{16}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi sebetulnya tanah seluas 16 ha, maka **B** mendapatkan bagian 4 ha, **C** mendapatkan bagian 6 ha dan **D** mendapatkan 6 ha.



Pada gambar ke-3 di atas, maka **A** mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dan **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$. Adapun kelebihanannya yaitu $\frac{1}{6}$ menurut Syafi'i harta tersebut di serahkan kepada *bait al-mal*. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi adalah sebetulnya tanah seluas 12 ha,

maka **A** mendapatkan bagian 6 ha, **B** mendapatkan bagian 4 ha dan sisanya 2 ha di serahkan kepada *bait al-mal*.

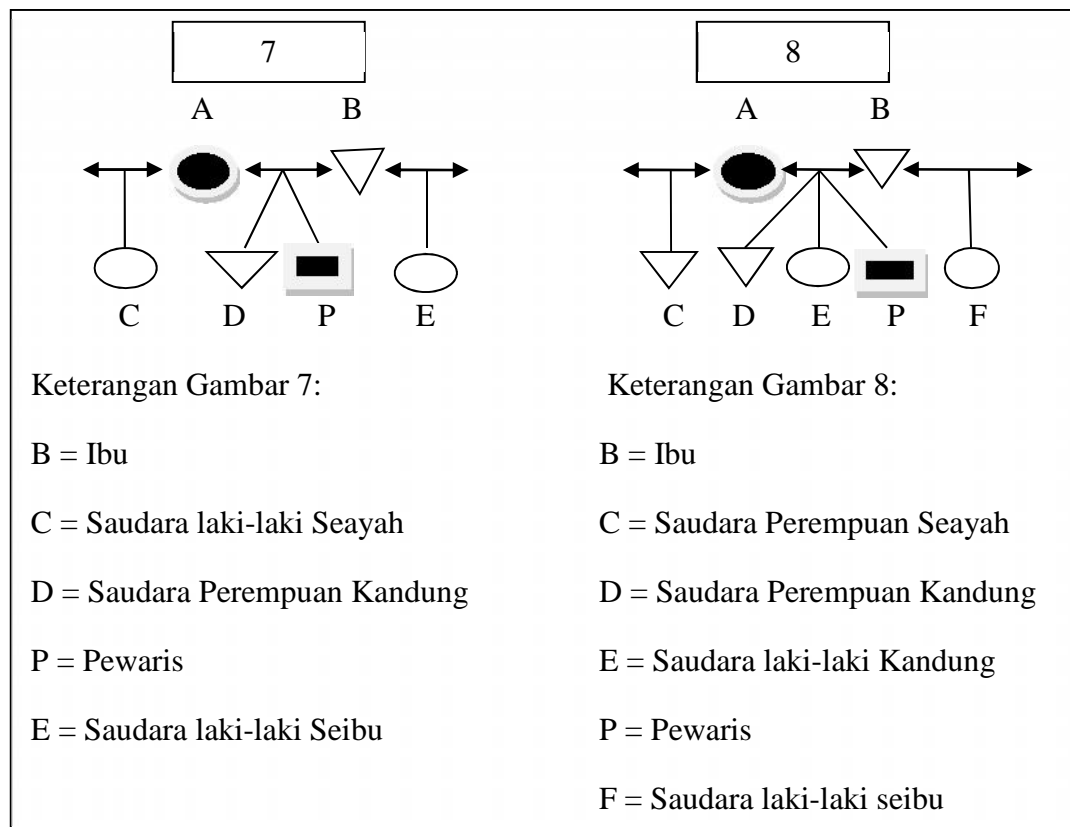
Adapun kasus gambar ke-4, **E** dan **F** mendapatkan bagian sebagai ashabah yaitu $\frac{5}{6}$ setelah di berikan kepada **G** bagiannya $\frac{1}{6}$. **E** dan **F** haruslah berbanding 1:1 dalam hal $\frac{5}{6}$ tersebut. Jika diumpamakan harta yang akan dibagikan adalah Rp. 12. 000.000, maka **E** dan **F** mendapatkan bagian Rp.10.000.000, jika dibagikan kepada masing-masing maka **E** mendapatkan bagian Rp. 5.000.000, **F** mendapatkan Rp. 5.000.000. adapun **G** mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,.



Pada gambar kasus 5 di atas, yang hanya tampil sebagai ahli waris adalah **G**. Maka **G** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, adapun sisa $\frac{5}{6}$ di raadkan kepada bait al-mal. Jika diumpamakan harta yang akan dibagikan adalah Rp.

6.000.000, maka **G** mendapatkan bagian Rp. 1.000.000. adapun sisanya yaitu Rp. 5.000.000 diraadkan kepada *bait al-mal*.

Adapun pada gambar kasus ke-6, **I** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{12}$, **Y** dan **Z** mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{4}{12}$ dan **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$. Dalam hal ini adanya sisa harta sebanyak $\frac{3}{12}$, maka sisanya diraadkan ke *bait al-mal*. Jika diumpamakan harta yang akan dibagi sebetulnya tanah seluas 12 ha, maka **I** mendapatkan bagian 2 ha, **Y** dan **Z** mendapatkan bagian 4 ha (jika di serahkan kepada masing-masing maka **Y** mendapatkan bagian 2 ha dan **Z** mendapatkan bagian 2 ha), adapun **B** mendapatkan bagian 3 ha. Adapun sisanya yang 3 ha lagi, diserahkan kepada *bait al-mal*.



Jadi pada gambar 7, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{36}$, **E** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{36}$, **C** dan **D** mendapatkan sisa yaitu $\frac{24}{36}$. **C**

dan **D** haruslah berbanding 2:1 dalam hal sisa tersebut, jadi **C** mendapatkan bagian $\frac{16}{38}$ dan **D** mendapatkan bagian $\frac{8}{36}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagikan adalah Rp.36.000.000, maka **B** mendapatkan Rp. 6.000.000, **C** mendapatkan bagian Rp.16.000.000, **D** mendapatkan bagian Rp. 8.000.000, dan **E** mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,.

Adapun pada gambar 8, **B** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{36}$, **F** mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{36}$, **C** terhibab oleh adanya **E**. **D** dan **E** mendapatkan sisa yaitu $\frac{24}{36}$. **E** dan **D** haruslah berbanding 2:1 dalam hal sisa tersebut, jadi **E** mendapatkan bagian $\frac{16}{38}$ dan **D** mendapatkan bagian $\frac{8}{36}$. Jika diumpamakan harta yang akan dibagikan adalah Rp.36.000.000, maka **B** mendapatkan Rp. 6.000.000, **E** mendapatkan bagian Rp.16.000.000, **D** mendapatkan bagian Rp. 8.000.000, dan **F** mendapatksan bagian Rp. 6.000.000,.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Hazairin saudara sebagai ahli waris berdasarkan ayat 12 dan 176 an-Nisa. Saudara pada kedua ayat *an-Nisa* tersebut merupakan semua hubungan persaudaraan, baik saudara seibu, saudara seayah atau saudara kandung. Saudara sebagai ahli waris tetap tampil meskipun bersama ayah. Hal ini disebabkan bahwa saudara hanya terhibab oleh keturunan pewaris, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Saudara sebagai ahli waris dapat terhibab apabila pewarisnya meninggal dengan mempunyai anak (keturunan) baik dari laki-laki maupun perempuan.
2. Saudara sebagai ahli waris berdasarkan ayat 12 dan 176 an-Nisa. Pemikiran Hazairin yang mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan hubungan semua persaudaraan sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam bahwa saudara pada ayat 12 an-Nisa adalah

saudara seibu, sedangkan saudara pada ayat 176 adalah saudara kandung atau seayah. Menurut Hazairin saudara sebagai ahli waris tetap tampil meskipun bersama ayah. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, di sebabkan bahwa arti “*walad*” yang terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 176 tersebut diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat *an-Nisa*, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak. Serta dapat dilihat juga *asbabun nuzul* ayat 176 surat *an-Nisa*. Menurut Hazairin saudara hanya terhibab oleh keturunan pewaris, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. hal ini bertentangan dengan Hukum Islam, bahwa yang menghibab saudara itu adalah anak(keturunan) yang laki-laki atau ayah. maka pemikiran Hazairin yang mengatakan anak (keturunan) dari perempuan menghibab saudara itu bertentangan dengan Hukum Islam.

B. SARAN

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemahaman penulis, penulis lebih cenderung terhadap Hukum Islam. Bahwa menurut pemikiran Hazairin ini tidak sesuai dengan ayat. Karena dalam menafsirkan ayat 12 dan 176 itu berdasarkan hasil pemikirannya. Serta dalam hal saudara tidak terhibab apabila ada ayah dan anak perempuan atau keturunan perempuan yang dapat menghibab saudara tampil sebagai ahli waris. Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud ayat. Oleh karena itu, dalam hal menetapkan ayat-ayat dalam al-quran haruslah melakukan penelitian secara *istidlal*.

2. Berdasarkan uraian Hukum Islam tersebut, penulis sependapat terhadap penjelasan tersebut. Karena dalam hal mengistinbatkan hukum, tidak akan mengeluarkan hukum segampang itu saja. Apalagi para sahabat yang pakar ahli bahasa, pastilah mereka lebih tau maksud ayat-ayat tersebut. Maka kepada penuntut ilmu agar menjadikan skripsi ini sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan terhadap apa yang menjadi tugas dan tantangan kita sebagai penuntut ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II
- Abu Zuhrah, Muhammad, *Hukum Waris*, penerjemah oleh Muhammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Al Yasak Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Al-albani, M. Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2005), Cet. 1, h. 470
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995)
- Al-Qur'anul Karim
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan, (Jakarta: Gema insani, 1999)
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa Oleh M. Samhuji Yahya, (Bandung: cv. Diponegoro, 1995)
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Bukhari, Al, *Al-Jami'Sahihu al-Bukhari*, (Kairo: Daru wa mathaba'ah'u al-Sya'bi), Juz VII,
- Fatchur Rahman, *'Ilmu al-Mawarits*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1994), Cet 3
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam(Fiqh Mawaris* , (Panam: Alaf Riau, 2008)
- Hasbiyallah, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ictiyar Baru Van Hoeve, 1992), Edisi Khusus, Jilid ke 3
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1981)
- Hazairin, Mahmud Yunus, Toha Jahja Omar, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, (Jakarta: Tintamas, 1964)
- Hazm, Ibnu, *al- Muhalla*, (Libanon: Maktabah al-Tijari, t.th)
- Himpunan perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2007)
- Isa al-Tarmizi, Abu, *al-Jami' al-Sahih*, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1938)
- Ja'far ibn Husen, Najamuddin, *Syara'i al-Islami*, (Teheran: Mansurati al-Ala, 1969), Jilid IV
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Tasikmalaya: kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suryalaya, 2009
- Khathib, Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Mekkah, Dar al-Katib al-Arabiyy, t.th)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (Penerbit IND-HILL, CO Edisi Revisi Kedua: 1987)

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2
- Moh. Anwar, *FARA'IDL: Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981)
- Moh.Dja'far, *Polemik Hukum Waris*, (Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2007),
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Alih bahasa oleh: Masykur , Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. 27
- Nur Asiah, *Ensiklopedia pahlawan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprina Media Grafika, 2009), Cet. 1
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. 5
- Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (jakarta: Gaya Media Pratama,1997)
- Tim Grasindo, *Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011)
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, ketua Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia,2009), Cet. 2